



**MAJU BERSAMA
HEBAT SEMUA**

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA

URGENSI PEMBENTUKAN TPPK



EDISI 24 | 2023



0 00035 54562 0

**MAJALAH
DIREKTORAT SMA
PEMIKIR • PEJUANG • PEMIMPIN**



DIREKTORAT SMA
DITJEN PAUD DIKASMEN
KEMENDIKBUDRISTEK



**MERDEKA
BELAJAR**

Selamat **HARI GURU NASIONAL**



**"Bergerak Bersama
Rayakan Merdeka Belajar"**



Tata Cara Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai Permendikbudristek No. 46/2023

- 

1 TPPK berjumlah minimal paling sedikit 3 anggota terdiri atas unsur:

 - a. pendidik (bukan kepala satuan pendidikan)
 - b. komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali
 - c. (dapat ditambahkan) perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi
- 

2 Bagi sekolah nonformal, anggota TPPK terdiri atas unsur pendidik (bukan kepala satuan pendidikan)
- 

3 Persyaratan anggota TPPK:

 - a. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih
 - c. tidak pernah dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Catatan

 - a. TPPK diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan
 - b. Semua persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai
- 

4 Bagaimana jika satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk membentuk TPPK?

Untuk konteks ini, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota membentuk TPPK dari gabungan satuan PAUD yang tetap memperhatikan keterwakilan unsur dan syarat keanggotaan.

Pastikan TPPK yang telah dibentuk dilaporkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman:

merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppksp

sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada:

ringkas.kemdikbud.go.id/laportppksatgas

Mari **gerak bersama** menciptakan lingkungan pendidikan yang **inklusif, berkebinekaan dan aman** bagi semua **#MerdekaBeragamSetara**

DAFTAR ISI

Salam Direktur

- 06** Urgensi Percepatan Pembentukan TPPK di Satuan Pendidikan

Utama

- 08** Upaya Satuan Pendidikan Membentuk TPPK
- 11** Bentuk-bentuk Kekerasan



- 12** Semua Siswa adalah Agen Perubahan
- 16** Alarm Menyalak, Yuk Cegah Terjadinya Kekerasan pada Anak

Khusus

- 20** Mekanisme Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP



- 24** Kapasitas Guru Meningkat, Mutu Pendidikan Terangkat
- 26** Pembentukan TPPK di Sekolah-sekolah

Berita Direktorat

- 28** Peringatan Hari Guru Nasional sebagai Ruang Apresiasi
- 32** Harumkan Nama Indonesia di Jepang lewat Program Tokyo Metropolitan Board of Education

34 Profil Sekolah

SMAN 19 Medan
Sekolah Sehat sebagai
Langkah Membentuk
Karakter

36 SMAN 4 Maluku Tengah
Kurikulum Merdeka
Menggelorakan
Semangat Berkarya

38 Inovasi

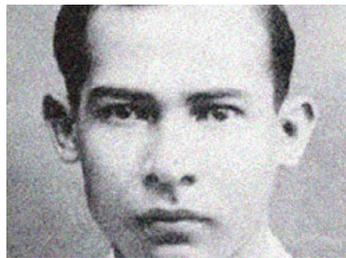
SMAN 34 Jakarta
Sekolah Ramah Anak dan
Duta Antikekerasan

40 SMAN 1 Ketapang
Bebas Hambatan Bagai
Jalan Tol

42 Profil Pelajar Berprestasi

Vania Putri Arfanda Kurnia
Menggali Potensi,
Meraih Prestasi

44 Muhammad Iqbal Raihan
Matematika adalah
Solusi



46 Hikayat

Mohammad Husni Thamrin
Politisi Betawi Pembela
Rakyat

48 Kosakata

Mayoritas Kosakata
Kita Warisan Penjajah?

Pengarah :
Winner Jihad Akbar

Dewan Redaksi:
Budi Suprpto
Fathuryati Hidayah
Untung Wismono
Soripada Harahap
Rina Imayanti
Irfan Harry Prastyia

Pemimpin Redaksi:
Jim Bar Pen

Redaktur Pelaksana:
Ihsan Maulana

Editor :
Agus Mardianto
Wiwik Setyowati
Fuad Yusril Wahab
Relia Apita Fahrurisa
Amalia Adhi Saleh
Roy Ridho Ubay Putra

Reporter:
Teguh Imam Sudarajat
Muwarni Santoso
Whika Cahyo Saputro
Ferriatman

Fotografer:
Muhammad Reza
Marthin Luter Barus
Ryan Armenderis

Desainer Tata Letak :
Abuyana Nur Saputra
Rully Riko Ero Niko

Sekretariat Redaksi:
Minarni Dewi
Friska Ayu Winda

Penerbit
Direktorat Sekolah Menengah Atas

Alamat Redaksi
Direktorat Sekolah Menengah Atas
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jl. RS Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan
021-759115532

Urgensi Percepatan Pembentukan TPPK di Satuan Pendidikan

Edisi kali ini majalah kita tercinta kembali mengangkat topik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Bagaimana untuk segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 atau Permendikbud PPKSP tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Ujung tombak dari Permendikbud PPKSP ini adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di seluruh satuan pendidikan. Maka seperti yang diamanatkan dalam peraturan tersebut, harus segera dibentuk TPPK agar dapat mewujudkan satuan pendidikan terbebas dari berbagai kasus-kasus kekerasan sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

Sayangnya, seperti diutarakan Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berdasarkan data yang ada dalam portal PPKSP di laman merdeka dari kekerasan, per 9 November 2023, TPPK yang sudah terbentuk baru sebanyak 190.431 di Satuan Pendidikan dari total 437.786 Satuan Pendidikan, atau hanya 25 persen. Sedangkan Satgas PPKSP yang sudah dibentuk pemerintah daerah baru sebanyak 18 pemkab/pemko, Satgas PPKSP pemprov belum.

Padahal dalam amanat Permendikbud PPKSP, TPPK dan Satgas PPKSP Pemerintah Daerah harus sudah terbentuk paling lambat 4 Februari 2024 untuk SD sampai dengan SMA/MA; sedangkan untuk PAUD dan pendidikan nonformal paling lambat 4 Agustus 2024. Karena kita semua harus mendorong percepatan pembentukan TPPK di satuan pendidikan dan kepala daerah untuk segera menetapkan Satgas PPKSP paling lambat 4 Februari 2024.

Seperti kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Merdeka Belajar Episode 25 pada Agustus 2023

yang lalu. Peraturan ini diluncurkan sebagai respons terhadap makin maraknya kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan.

Banyak survey dan penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga menyebutkan tingginya kasus kekerasan. Survei Asesmen Nasional tahun 2022 misalnya yang menyebutkan bahwa sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan.

Sedangkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 menyebutkan bahwa 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat data aduan yang diterima pada perlindungan khusus anak tahun 2022 menyebutkan, kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133.

Permendikbudristek PPKSP tidak sekadar menjadi landasan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan, tetapi juga jadi rujukan dan membuat mekanisme upaya pencegahan dan penanganan kekerasan itu dilakukan.

Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Ada pun bentuk-bentuk kekerasan secara rinci dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 disebutkan ada 7 poin, yaitu: **1. Kekerasan Fisik**, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu; **2. Kekerasan Psikis**, yaitu setiap perbuatan tanpa



WINNER JIHAD AKBAR
PLT. DIREKTUR SMA

kontak fisik (non-fisik) yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman; **3. Perundungan**, berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan dengan maupun tanpa alat bantu yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman; **4. Kekerasan Seksual**, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau Gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Selanjutnya **5. Diskriminasi dan Intoleransi**, yaitu setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik berkaitan dengan kondisi disabilitas seseorang; **6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan**, didefinisikan sebagai kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagai kebijakan yang berpotensi atau telah menimbulkan terjadinya Kekerasan, yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.

Terakhir **7. Bentuk-bentuk Kekerasan Lainnya**, yaitu tindakan Kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terjadi sesuai ruang lingkup dan cakupan kebijakan ini untuk mengakomodasi berbagai bentuk Kekerasan yang mungkin akan muncul ke depannya.

Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Agar efektif, implemmentasi dari peraturan menteri tersebut bekerja berdasarkan data, terstruktur, dan massif yang melibatkan berbagai pihak. Karena peraturan menteri ini hadir tidak hanya untuk melindungi peserta didik namun juga *stakeholder*, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, warga satuan pendidikan lainnya, termasuk kelompok-kelompok disabilitas.

Melalui peraturan menteri ini kita berharap dapat mendorong hadirnya lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, nyaman, menyenangkan, dan berkebhinekaan. Namun peraturan menteri ini tidak akan efektif tanpa adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Maka pembentukan TPPK di satuan pendidikan sangat mendesak, demikian pula pembentukan Satgas PPKSP di pemerintah daerah. Hal ini guna memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Satgas TPPK pemerintah daerah memantau pelaksanaan tugas TPPK di satuan pendidikan.

Karena itu sangat penting kiranya kolaborasi dari para pemangku kepentingan, seperti sekolah, orang tua, dan juga masyarakat secara umum. Peran semua pihak sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar tanpa kekerasan. Semua elemen perlu saling mendukung untuk bersama-sama menghentikan kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Orang tua murid dan masyarakat luas dapat ikut andil dengan turut menjadi anggota TPPK.

Kita berharap bahwa terbentuknya TPPK di satuan pendidikan maupun Satgas PPKSP pemerintah daerah dapat berdampak luas, termasuk memicu pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam keluarga, dan di masyarakat.

Mari berkolaborasi dalam upaya percepatan pembentukan TPPK di satuan pendidikan demi mencegah dan menangani kekerasan sehingga cita-cita terciptanya lingkungan pendidikan anak-anak kita bisa aman, nyaman, menyenangkan dan juga inklusif bagi semua warga sekolah dapat segera terwujud.

Upaya Satuan Pendidikan Membentuk TPPK

Kekerasan dengan berbagai bentuknya tidak boleh diberi tempat di mana pun. Karena kekerasan bukan hanya bertentangan dengan fitrah suci manusia yang harus dijunjung, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan. Satuan pendidikan sebagai benteng moral dalam kehidupan bermasyarakat harus menjadi entitas yang sudah semestinya paling depan menabuh gendang perang terhadap kekerasan.

Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 adalah payung hukum untuk perang melawan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun peraturan ini

akan berjalan efektif apabila tidak ada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan. Karena itu pembentukan TPPK harus didorong bersama-sama agar dilakukan percepatan untuk mewujudkannya.

Winner Jihad Akbar, Pelaksana Tugas Direktur SMA Kemendikbudristek, dalam webinar percepatan pembentukan TPPK menekankan perlunya kolaborasi semua pihak dalam mencegah dan menangani kekerasan. Seluruh masyarakat diperlukan partisipasinya untuk percepatan pembentukan TPPK. Sebagai orang tua peserta didik misalkan, mereka berhak datang ke sekolah mempertanyakan pembentukan TPPK apabila di sekolah tempat anaknya belajar belum dibentuk TPPK.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 adalah terobosan besar yang diharapkan akan mengakhiri segala bentuk kekerasan di sekolah dan melahirkan generasi yang menghargai nalar dan kasih sayang. Namun terobosan besar perlu dikawal oleh segenap *stakeholder* untuk menjamin bahwa terobosan tersebut terlaksana dengan baik, bukan sekadar di atas kertas. Karena itu percepatan pembentukan TPPK harus dilakukan.

Seperti dikatakan Agus Muhamad Solihin, Ketua Subtim Pencegahan Perundungan, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, dalam webinar yang sama, Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, bukan hanya secara rinci menjelaskan kekerasan dengan berbagai bentuk dan variasinya, tapi juga mengamankan pembentukan TPPK dan Satgas PKSP di pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hal ini perlu didorong mengingat per tanggal 9 November 2023, baru sekitar 190.431 di Satuan Pendidikan dari total 437.786 Satuan Pendidikan yang sudah membentuk TPPK, atau hanya 25 persen. Sedangkan Satgas PPKSP yang sudah dibentuk pemerintah daerah baru sebanyak 18 pemkab/pemkot, sementara pemerintah provinsi belum satu pun yang melaporkan telah membentuk Satgas PPKSP.

Juli Sugiati, Anggota TPPK dan Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 34 Jakarta, berpendapat, pembentukan TPPK di satuan pendidikan menutup peluang terjadinya kekerasan yang baru. Ia menengarai banyak penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, salah satunya adalah paparan berita dan tayangan dari gawai yang massif di era digital ini. Menurutnya, dampak kekerasan yang menimpa peserta didik sangat serius dan menyebabkan trauma yang bisa jadi dirasakan sepanjang hidupnya.

“Sebetulnya mudah mengenali anak yang mengalami kekerasan atau *bullying*. Seorang anak yang biasanya ceria, lalu tiba-tiba murung, tak mau masuk sekolah, itu gejala anak tersebut mengalami kekerasan. Mereka perlu didampingi,” ujarnya.

Melakukan pendampingan dan penanganan selanjutnya terhadap korban kekerasan akan sulit dilakukan apabila di sekolah belum ada TPPK.

Bagi Juli, dengan adanya TPPK yang merupakan amanat Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, jadi wadah bagi pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh masyarakat untuk berkolaborasi menghapus kekerasan di lingkungan sekolah, mewujudkan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak sehingga mereka dapat mengembangkan seluruh potensi terbaiknya untuk masa depan.

TPPK di SMAN 34 Jakarta sendiri terbentuk pada tanggal 2 Oktober 2023 melalui proses seperti yang dituangkan dalam peraturan menteri. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumpulkan para kepala sekolah untuk menyosialisasikan tentang TPPK, fungsi dan mekanisme pembentukannya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan memang sangat berperan penting untuk mendorong percepatan pembentukan TPPK di satuan pendidikan.

Anggota TPPK di SMA Negeri 34 berjumlah 15 orang, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Anggota TPPK harus memenuhi kriteria, salah satunya tidak pernah melakukan kekerasan. TPPK bersinergi bersinergi dengan program Sekolah Ramah Anak dan Duta Antikekerasan yang ada di SMA Negeri 34. “Bagi kami di SMA Negeri 34 Jakarta, TPPK itu sangat penting dan memberi manfaat rasa aman nyaman bagi peserta didik dan pendidiknyanya juga,” kata Juli.

Imam Faturachman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, menegaskan TPPK memang harus segera dibentuk. Sebagai pimpinan dinas pendidikan, pihaknya terus bergerak menjalankan perannya dengan langkah-langkah yang berani agar satuan pendidikan aman dan nyaman buat tenaga pendidikan, guru-guru serta peserta dan warga pendidikan yang ada di dalamnya.

“

Sebagai orang tua peserta didik misalkan, mereka berhak datang ke sekolah mempertanyakan pembentukan TPPK apabila di sekolah tempat anaknya belajar belum dibentuk TPPK.

WINNER JIHAD AKBAR
PLT. DIREKTUR SMA



WEBINAR
PERCEPATAN PEMBENTUKAN TPPK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN SATUAN TUGAS DI PEMERINTAH DAERAH

Bersama

Winner Jihad Akbar
 Pj. Direktur SMA, Kemendikbudristek

Agus Muhammad S.
 Ketua Subtim Pencegahan Penyalangan Pusat Penguatan Karakter

Juli Sugiaty
 Guru Bimbingan Konseling SMAN 24 Jakarta

Imam Faturochman
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Moderator:
Prima Al Bukhori

Kamis, 2 November
 15.00-15.00 WIB

Live dari Channel
Direktorat SMA

MERDEKA BELAJAR

“Penanganan pemenuhan dan perlindungan anak haruslah bersifat holistik dan tidak parsial. di satuan pendidikan di mana kita mengabdikan kepada bangsa dan negara yang di dalamnya ada anak-anak saleh, anak-anak hebat, responsif, pintar yang memiliki potensi serta minat bakat yang berbeda tentunya,” ujar Imam.

Pembentukan TPPK sebagai amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, seiring sejalan dengan konvensi hak anak, perjanjian yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi yang diakui secara internasional dan menjadi ketetapan bersama negara-negara di dunia.

“Permendikbud 46 Tahun 2023 itu menjadi energi baru buat kami di Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera membentuk satgas di tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan SK Satgas PPKSP,” kata Imam.

Seperti dikatakan Winner Jihad Akbar dan Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), seluruh elemen masyarakat harus ikut andil dalam menciptakan sekolah sebagai yang nyaman dan inklusif. Bisa dengan mengajak berbagai komunitas yang bergerak di bidang pendidikan untuk mempercepat pembentukan TPPK. Beberapa komunitas yang aktif mendorong pelaksanaan Permen

46/2023 tersebut antara lain Ibu Penggerak Sidina Community, Komunitas Kami Pengajar, dan Komunitas Guru Belajar Nusantara.

Isti Budi Setiawati, pendiri Sidina Community, sejak terbitnya Permen KKSP, ia langsung bergerak melakukan sosialisasi regulasi tersebut. Isti mengajak ibu-ibu melakukan sosialisasi guna mendorong dibentuknya TKKP di sekolah-sekolah.

Hal yang sama dilakukan Aishah Basar, Kepala Sekolah SMA I Andam Dewi, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia telah membuat Surat Keputusan (SK) untuk pembentukan TPPK. “Kami telah bergerak melakukan sosialisasi Permendikbud PPKSP kepada seluruh warga sekolah, mulai keamanan sekolah, guru piket, guru Bimbingan Konseling untuk memantau setiap hari jika terjadi kasus kekerasan. Pembentukan TPPK sangat penting dan mendesak,” ujarnya.

Ninin Nirawaty, Kepala Sekolah SMAN 4 Tangerang, Banten, juga mengatakan hal yang sama. Pembentukan TPPK cukup mendesak mengingat maraknya kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Ia menuturkan bahwa pihaknya sudah melewati tahap sosialisasi dan sekarang sudah membentuk TPPK.

Ninin merekrut guru, orang tua peserta didik, hingga tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi anggota TPPK. “Nama-nama anggota TPPK ini kami sosialisasikan dalam program Literasi Kebangsaan yang digelar setiap hari Senin,” kata Ninin.



Aishah Basar

Kepsek SMAN 1 Andam Dewi, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Bentuk-bentuk Kekerasan

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 menjelaskan secara rinci apa saja yang termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan yang perlu dicegah dan ditangani. Berikut ini secara ringkas bentuk-bentuk kekerasan tersebut.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan tanpa kontak fisik (non-fisik) yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

3. Perundungan

Perundungan dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Perundungan merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada Korban berupa kontak fisik, baik dengan maupun tanpa alat bantu dan/atau Kekerasan psikis berupa perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman; yang dilakukan secara berulang serta dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa. Faktor yang membedakan bentuk Kekerasan perundungan dengan Kekerasan lain adalah unsur keberulangan dan relasi kuasa yang timpang.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau Gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

5. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan

intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik berkaitan dengan kondisi disabilitas seseorang.

6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Permendikbud PPKSP mendefinisikan kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagai kebijakan yang berpotensi atau telah menimbulkan terjadinya Kekerasan, yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.

Sedangkan, kebijakan yang telah menimbulkan terjadinya Kekerasan adalah kebijakan yang telah mendorong pihak pelaksana kebijakan untuk melakukan bentuk Kekerasan tertentu. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan Kekerasan yang bersifat 'institusional', yakni tindakan Kekerasan yang dilakukan pejabat yang memiliki kedudukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diformalkan dalam bentuk kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis dapat berupa imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya seperti tradisi dan sanksi tidak tertulis.

7. Bentuk-bentuk Kekerasan Lainnya

Bentuk Kekerasan lainnya sebagai tindakan Kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terjadi sesuai ruang lingkup dan cakupan kebijakan ini untuk mengakomodasi berbagai bentuk Kekerasan yang mungkin akan muncul ke depannya.



Semua Siswa adalah Agen Perubahan

Pendidikan yang terbebas dari kekerasan menjadi syarat mutlak agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Butuh peran aktif seluruh warga sekolah untuk membangun iklim yang sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Agen perubahanpun diperlukan, dalam hal ini semua siswa dapat menjadi agen perubahan.

Kemendikbudristek mendukung visi misi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Plt. Direktur SMA Direktorat Winner Jihad Akbar dalam gelar wicara 'Praktik Baik Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan' pada November 2023 lalu berharap hal ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk menyongsong visi Pendidikan Indonesia tahun 2035 dalam membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup.

Masyarakat yang memiliki semangat menjadi pembelajar seumur hidup akan menciptakan generasi yang unggul, memiliki *mindset* global,





sejahtera, menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan juga Pancasila. Kita tahu visi dan misi Presiden, Kemendikbudristek dan juga negara kita, tidak akan bisa tercapai jika kita tidak melindungi anak-anak kita, pendidikan kita dari kekerasan.

Seperti ditegaskan Direktur SMA Direktorat Winner Jihad Akbar, inilah syarat mutlak anak-anak kita bisa belajar dengan baik, aman, nyaman, menyenangkan. Kebijakan pencegahan perundungan ini juga sudah menjadi perhatian nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Serta Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.

Pencegahan kekerasan ini juga menjadi salah satu nilai dalam upaya penguatan karakter siswa didik melalui promosi profil pelajar Pancasila. Untuk pencegahan ini juga sudah ada kebijakan baru yaitu Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Kita ingin mencegah dan menangani kekerasan lebih baik lagi melalui beberapa penjelasan terbaru yang lebih rinci.

Winner Jihad Akbar berharap, gelar wicara itu bermanfaat terutama bisa mencegah dan menangani kekerasan di satuan Pendidikan, khususnya di SMA. Winner mengimbuhkan, terkait definisi kekerasan dan sebagainya termasuk berbagai tugas TPPK yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. "Kita ingin TPPK yang terbentuk ini bisa menyampaikan usulan dan rekomendasi program-program apa saja untuk pencegahan di satuan pendidikan kemudian

memberikan masukan atau saran pada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman, nyaman di satuan pendidikan, kemudian sosialisasi kebijakan, menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan," kata Winner.

Apabila sudah ada kekerasan terjadi, melakukan penanganannya terhadap penemuan dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lantas menyampaikan pemberitahuan terhadap orang tua/wali siswa yang terlibat, juga memeriksa laporan dugaan kekerasan, membuat rekomendasi sanksi yang terkait, mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di satuan pendidikan dan juga memfasilitasi pendamping ahli jika ada korban yang memang membutuhkan, pelapor atau saksi bisa dibantu, memberikan rujukan juga bagi korban ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.

"Kemudian juga ada memberikan rekomendasi pendidikan anak yang terlibat dalam kekerasan, kemudian melaporkan segala tugas ini kepada kepala dinas Pendidikan. Tugasnya banyak sekali ini, TPPK," beber Winner Jihad Akbar.

Rupanya, sebelum ada Permendikbud 46 sudah ada program-program yang membantu terkait pencegahan kekerasan. Salah satunya adalah program Roots yang sudah dikembangkan kerjasama Kemendikbudristek dengan Unicef Indonesia tahun 2017-2020 bersama pemerintah Indonesia, kementerian, universitas, serta berbagai praktisi-praktisi. "Kerjasama antara Kemendikbudristek dengan Unicef ini sudah dilaksanakan program-program tahun 2021 untuk



jenjang SMP, SMA dan SMK. Nah tujuan Roots ini adalah untuk memusatkan peran siswa/pelajar di sekolah sebagai agen perubahan. Jadi kita ke Roots, ke akarnya. Kita ingin menjadikan mereka sebagai agen perubahan, untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebayanya, untuk mencegah perundungan dan kekerasan berbasis sekolah atau satuan Pendidikan,” tutur Winner.

Fokus penekanan program Roots tersebut, lanjut Winner, adalah pada peran siswa yang bertujuan mengubah norma sosial di sekolah untuk menanamkan perilaku positif. “Bagaimana kita menyamakan pemahaman, pencegahan, penanganan perundungan dan tindak kekerasan di sekolah, bagaimana mencegah, menanggulangi, bagaimana meminimalkan perundungan dan bagaimana meminimalkan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Dan juga mewujudkan nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter, melalui pencegahan, bagaimana program-program pencegahan perundungan di satuan Pendidikan,” tambahnya.

Winner mengatakan, program-program Roots ini difokuskan pada kalangan teman sebaya. “Kalangan yang lebih mudah, kita perlu *speak up*, banyak terjadi kekerasan atau perundungan karena tidak terungkap. Dengan adanya kita berfokus pada pelajar, kalangan teman sebaya, ada agen-agen perubahan dari siswa, kita ingin supaya membangun iklim yang aman di sekolah, dengan mengaktifkan siswa sebagai agen perubahan

ini. Nah program Roots ini akan dimasukkan ke dalam kegiatan di sekolah. Di mana pegawai, guru, siswa akan mendesain Roots di sekolah sesuai kebutuhan dan konteks lokal yang diikuti dengan internalisasi desain kegiatan tersebut di sekolah,” jelas Winner panjang lebar.

Dalam gelar wicara alias webinar “Praktik Baik Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan” Direktorat SMA ingin menggali dari narasumber guru-guru SMA Negeri 14 Pandeglang dan SMAN 1 Ketapang Sampang, yang sudah melaksanakan program roots dan juga program disiplin positif di sekolah. “Kita ingin berbagi karena memang ini terkait dengan praktik ya, yang memang *real* terjadi. Kalau kita melihat konsepnya banyak yang berpendapat oh tidak mungkin diterapkan, ini kita berikan contoh-contoh yang sudah terjadi di Ketapang dan Pandeglang.

Mudah-mudahan dengan kegiatan gelar wicara praktik baik ini, bisa menambah khazanah kita, bisa turut membantu kita dalam membentuk TPPK ya untuk pencegahan, penanganan di satuan pendidikan dan untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila dan menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang saya inginkan dan kita inginkan bersama bagaimana supaya bisa menekan angka perundungan, kekerasan seksual dan juga intoleransi di masyarakat khususnya di satuan Pendidikan,” kata Winner.



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



SEMANGAT PAHLAWAN
UNTUK MASA DEPAN BANGSA
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN
DAN KEKORUPSIAN

Selamat

HARI PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

10 November



Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai
jasa pahlawannya.

Bung Tomo



Alarm Menyalak, Yuk Cegah Terjadinya Kekerasan pada Anak

Berita tentang perundungan dan tindak kekerasan pada anak masih saja marak. Dari catatan KPAI hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dan dari Rapor Pendidikan tahun 2023, terkait iklim keamanan secara nasional angkanya masih termasuk kategori baik namun di jengjang menengah sedikit menurun.

Hal itu merupakan alarm bagi kita semua untuk bergerak mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Sekolah sebagai tempat tinggal ke dua bagi anak karena hampir sepertiga waktunya dihabiskan di sekolah, diharapkan memiliki lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang, aman, nyaman dan menyenangkan. Bagaimana upaya sekolah untuk mewujudkannya?

Pada Gelar Wicara “Praktik Baik Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan” Senin, 13 November 2023, Direktorat SMA mengajak para pendidik yakni guru dan para kepala sekolah, serta perwakilan dinas pendidikan se-Indonesia untuk berbincang bersama. Erni, S.Pd., pendidik dari SMA 14 Pandeglang, Banten, salah satu pembicara dalam diskusi tersebut memaparkan upaya pencegahan kekerasan di SMAN 14 Pandeglang, melalui salah satu program yakni Roots. Dia memaparkan, setelah para fasilitator guru mendapatkan pengarahannya bimbingan teknis atau bimtek dari Kementerian, dengan Puspeka (Pusat Penguatan Karakter) dan UNICEF, pihaknya membentuk agen perubahan sebanyak 30 siswa yang dipilih melalui google form. Mereka mewakili 10 orang teratas yang paling sering berinteraksi, 10 menengah dan 10 terbawah.

Sekolah memadukan antara siswa-siswa yang ‘terkenal’ (karena sering berinteraksi) dengan siswa-siswa yang kurang berinteraksi. Alasannya, karena bisa jadi dari siswa yang kurang berinteraksi itu juga ada potensi terpendam. Jadi, agen perubahan itu bisa dilakukan oleh semua siswa, bukan siswa yang aktif di OSIS saja, misalnya.

Erni menyebut, SMAN 14 Pandeglang melaksanakan program Roots sejak tahun 2022 lalu. Setelah pembentukan agen perubahan itu, lanjut Erni, ada pengenalan dari 10 modul wajib dan juga 15 modul pilihan, setiap modul dipelajari dalam seminggu.

Menurut Erni, pada setiap modul ada tantangan yang harus dilakukan oleh para agen perubahan. Tantangan itu berupa interaksi, kegiatan-kegiatan yang memang isinya untuk

memberikan interaksi yang positif terhadap rekan siswa yang lain misalnya mempraktikkan perilaku positif terhadap siswa. Jadi, memang perilakunya lebih ke interaksi antarpeserta didik. Para agen perubahan ini sudah ada surat izin atau persetujuan dari orang tua atau walinya untuk mengetahui mereka menjadi agen perubahan untuk membawa sekolah ini menjadi lebih baik.

Lalu setelah selesai 10 modul, modul 11, 12, 13 itu persiapan untuk Roots Day, acara puncak berupa gelar karya. Dalam Roots Day inilah, para agen perubahan menunjukkan hasil kerjanya, menampilkan kreasi dari agen perubahan selama mempelajari 10 modul itu. “Jadi bentuknya adalah pameran hasil karya dan juga berisi informasi-informasi perubahan apa saja yang diinginkan oleh agen perubahan, juga yang diinginkan oleh para siswa yang sudah berinteraksi selama mempelajari modul tersebut. Di dalam Roots Day ini dimasukkan juga deklarasi anti-perundungan, seluruh warga sekolah menyatakan bahwa sekolah ini anti-perundungan maupun kekerasan,” papar Erni.

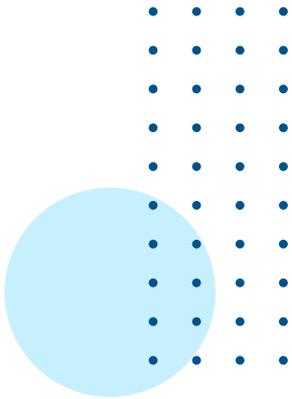
Dampak dari program Roots ini, di antaranya warga sekolah yang awalnya tidak mengetahui jenis kekerasan yang berpotensi terjadi di sekolah, mereka sudah lebih paham, sehingga tidak melakukan hal tersebut. Dan juga lebih berani melaporkan kepada pihak sekolah. Selain itu, para guru lebih memperhatikan kebutuhan para peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Terdapat perbedaan yang sangat kentara, dari sebelum dilaksanakannya program Roots dan sesudahnya. Erni mengatakan, secara nyata seperti yang ditemuinya di lapangan, umpamanya dahulu peserta didik banyak yang memanggil temannya dengan nama



Erni, S.Pd.

Guru SMA 14 Pandeglang, Banten



Kegiatan bimbingan teknis agen perubahan pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah.

orang tua maupun mencela tampilan fisik (*body shaming*). Ketika mereka menyadari apa yang mereka katakan itu suatu bentuk kekerasan, mereka lebih menahannya, tidak melakukannya lagi.

“Oh, itu kekerasan, ada rekan siswa yang saling mengingatkan. Jadi memang ada perubahan seperti itu,” ujar Erni.

Perubahan positif terlihat pada keseharian. Pelajar akan lebih paham definisi kekerasan, hal yang tadinya mereka melakukan karena mereka tidak tahu. Setelah mereka paham bahwa hal itu termasuk kekerasan dan atau perundungan, mereka tidak melakukannya lagi.

Yang mereka tahu selama ini, kekerasan itu hanya yang berkaitan dengan fisik saja seperti berkelahi. Kini, lebih banyak anak yang menyadari sehingga secara tidak langsung mereka mengajak teman-teman lainnya untuk turut mencegah terjadinya kekerasan dari hal terkecil sehari-hari.

Untuk pelaporan dan pemantauan di sekolah, agen perubahan membuat kotak perubahan yang boleh diisi siswa. Kotak tersebut akan dibuka seminggu sekali, setiap ada pertemuan agen perubahan.

Selain menjadi fasilitator di sekolah tempatnya mengajar, Erni juga membantu rekan-rekan guru di sekolah lainnya untuk mengembangkan program Roots. Erni

mengakui, ada tantangan yang mesti Erni hadapi namun ia bisa melaluinya. Tantangan yang dimaksud adalah soal waktu dan pendanaan.

“Di awal-awal program saja, mencari waktu untuk dapat mengadakan kegiatan. Tapi sesudah berjalan sudah enak. Ketika mendengar dari sekolah lain karena saya juga sambil mendampingi khususnya untuk wilayah Banten, keterlaksanaan dari program Roots ini, ada beberapa kendala terutama masalah pendanaan. Lalu kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah, dalam hal ini mungkin para kepala sekolah. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan ketika hasil dari pendampingan sampai akhir bulan Oktober kemarin,” tutur Erni yang juga guru penggerak, fasilitator dan struktur guru penggerak serta aktif sebagai fasilitator nasional program Roots, program kerjasama UNICEF Indonesia dan pemerintah RI.

Untuk program Roots, menurut Erni, pendanaan menggunakan dana BOSP. Dan karena Roots merupakan bagian dari pembinaan karakter, secara spesifik pengeluarannya hanya untuk konsumsi peserta. Pencegahan kekerasan ini bisa diintegrasikan ke P5 (Projek Penguatan Profil Pemuda Pancasila) untuk bangunlah jiwa raganya. Erni mencontohkan, cara mengintegrasikan program pencegahan kekerasan ini dalam P5 ialah dengan mengekstrak modul-modul Roots yang



dengan baik, bagaimana pelaksanaannya lalu nanti dampaknya yang akan diperoleh seperti apa. Jadi bapak ibu guru bimtek terus dengan kementerian itu sebaiknya secara persuasif dengan kepala sekolah, sebelum sosialisasi dengan warga sekolah. Jadi dijelaskan dulu sebetulnya programnya ini seperti apa. Lalu kegiatannya dari awal sampai akhir apa, lanjutannya seperti apa, dampak yang akan diberikan kepada sekolah seperti apa. Kepala sekolah sangat mendukung karena memang memberikan dampak dan memang membantu pihak sekolah dalam hal pembentukan karakter siswa,” papar Erni.

“Jadi memang melalui program Roots ini kita menumbuhkan karakter-karakter positif dalam diri siswa. Sehingga bisa mengikis sedikit demi sedikit nih karakter negatif yang ada di dalam diri siswa,” tambahnya.

Selain tips pendanaan dan pendekatan kepala sekolah, Erni juga berbagi tips untuk sekolah lainnya agar dapat melakukan program pencegahan kekerasan. Untuk mencegah perundungan atau kekerasan di sekolah, ungkap Erni, kita harus menumbuhkan rasa percaya diri dan empati dalam diri siswa. “Sehingga kalau sudah tumbuh rasa empatinya, tidak ada perundungan lagi dalam segi verbal maupun yang lainnya. Saya kasih tipnya bagaimana program-program yang kita buat di sekolah itu terintegrasi dengan penguatan karakter terutama karakter Profil Pelajar Pancasila terutama untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan saling empati sesama siswa, menghargai keberagaman yang ada.”

bisa dijadikan kegiatan untuk penguatan seluruh karakter siswa.

“Tapi lebih dikerucutkan lagi. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan empati, juga keberagaman,” tegasnya.

Mengenai pendekatan terhadap kepala sekolah, Erni punya tips dan trik sehingga program Roots bisa terlaksana di SMAN 14 Pandeglang.

“Kalau kepala sekolah kami sangat mendukung ya, selama kita menjelaskan programnya

Mekanisme Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP

Ada sembilan hal yang dirumuskan dari Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan Satuan Pendidikan (PPKSP), yaitu: pertama, menguraikan bentuk-bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi secara rinci dan mudah dipahami. Hal ini agar tidak multitafsir guna menghindari subjektivitas.

Kedua, melakukan pencegahan kekerasan. Upaya ini dilakukan juga dengan sejumlah mekanisme yang jelas. Upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan yang bukan saja berdampak buruk bagi korban tetapi juga berpotensi mengganggu sistem pembelajaran. Pencegahan pada dasarnya lebih penting dan lebih mudah ketimbang menangani setelah kasus kekerasan terjadi. Karena itu upaya pencegahan ini harus lebih gencar dilakukan.

Ketiga, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas (Satgas). Pemerintah tidak hanya mendorong pembentukan TPPK di satuan pendidikan, tapi juga mendorong peran pemerintah daerah membuat Satgas PPKSP. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 merupakan terobosan besar Kemendikbudristek. Namun tak akan berjalan

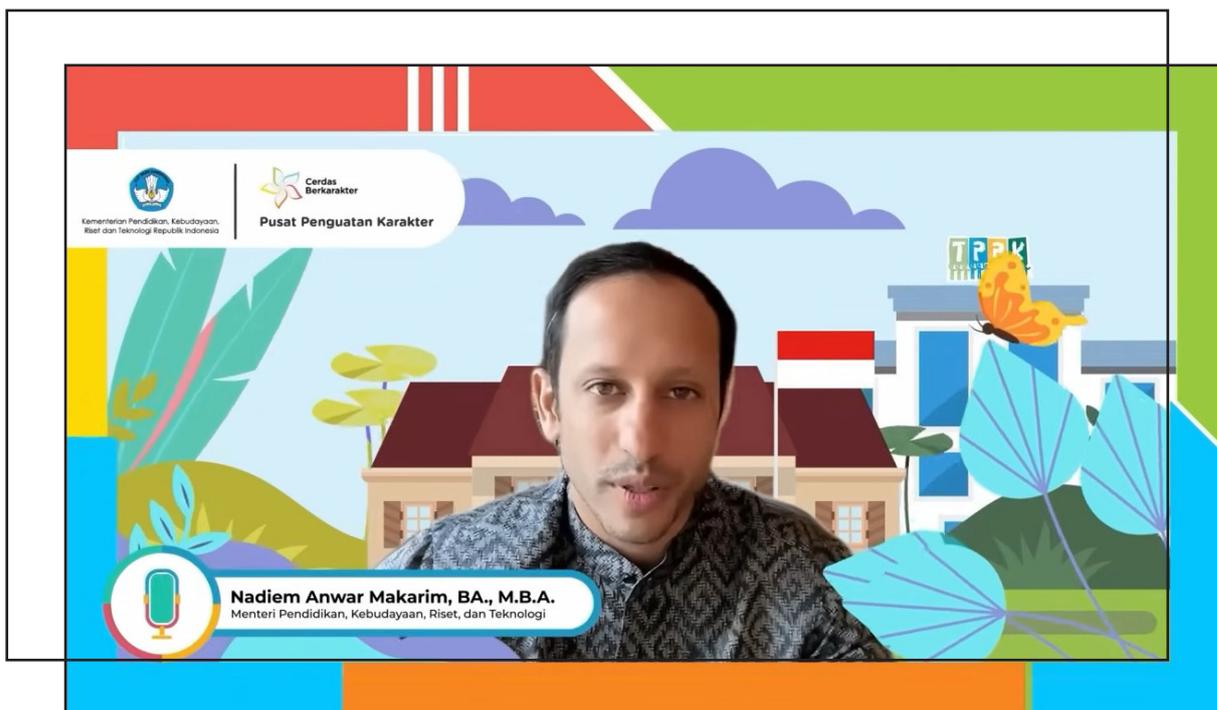
efektif tanpa adanya TPPK dan Satgas PPKSP. Peraturan menteri tersebut bahkan dalam poin-poin rinciannya mengamanatkan pembentukan TPPK dan PPKSP.

Keempat, apabila sudah terjadi kekerasan, maka harus dilakukan penanganan yang tepat, baik kepada korban maupun pelaku. Faktanya banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Karena itu pencegahan saja tidak cukup. Penanganan kasus kekerasan harus dilakukan dengan pendekatan yang bijak, tidak hanya bagi korban, tapi juga pelaku.

Kelima, penanganan kekerasan bukan hanya melindungi korban dengan pendekatan berpihak kepada korban serta memberi upaya khusus untuk menghindari trauma serta tetap melindungi hak-hak korban, serta mengarahkan pelaku kekerasan.

Keenam, mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Setiap elemen masyarakat, baik individu maupun komunitas, yang memiliki kepedulian pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berperan serta secara aktif. Misalkan dengan menjadi anggota TPPK di sekolah-sekolah. Atau menegur sekolah yang belum membentuk TPPK.





Ketujuh, pengelolaan data kasus. Semua data tentang kekerasan di satuan pendidikan disimpan dan diolah sebagai rujukan dalam membuat peraturan. Selain itu pengelolaan data kekerasan sangat penting agar tidak menimbulkan trauma bagi korbannya

Kedelapan, penghargaan. Penghargaan dirumuskan sebagai bentuk terima kasih kepada setiap anggota masyarakat baik individu maupun komunitas. Penghargaan diberikan agar masyarakat yang aktif terlibat mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan.

Kesembilan, pendanaan. Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP tentunya memerlukan pendanaan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan dana dalam mencegah dan menangani kekerasan.

Tutorial Pelaporan Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP

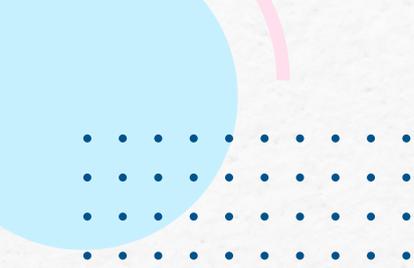
TPPK bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan melalui usulan Dinas Pendidikan satuan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan TPPK dan satuan tugas hadir untuk memastikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dapat segera ditangani dan korban mendapatkan pemulihan satuan pendidikan membentuk TPPK dengan tugas dan fungsi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

TPPK memiliki 13 fungsi, yaitu Mengusulkan

dan merekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan; Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman bisa Tuan pendidikan; Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; Menerima dan Menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.

Fungsi lainnya adalah Melakukan penanganan terhadap tumbuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; Menyampaikan Pemberitahuan kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; Memeriksa laporan dugaan kekerasan 8 memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan Berdasarkan hasil pemeriksaan; Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban pelapor dan atau saksi.

Selanjutnya, Memberikan rujukan bagi korban pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan; Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit satu dalam satu tahun TPPK juga memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan pelapor korban saksi terlapor dan orang tua atau wali pendamping dan atau ahli.



Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya.

Kedua, berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang melibatkan korban saksi pelapor dan atau terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satuan pendidikan lain dan; ketigs berkoordinasi dengan pihak lain untuk memulihkan dan identifikasi dampak kekerasan seperti psikolog tenaga medis tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, dan atau profesi lainnya yang sesuai kebutuhan.

Anggota TPPK dibentuk dengan jumlah ganjil atau paling sedikit tiga orang dengan perwakilan dari pendidik dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali jika diperlukan, perwakilan tenaga kependidikan juga dapat menjadi anggota TPPK sebagai tenaga administrasi. Bagi satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang tidak dapat membentuk TPPK karena sumber daya manusianya tidak mencukupi, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan PAUD yang ditetapkan oleh dinas pendidikan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai TPPK akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Sedangkan untuk satuan pendidikan non formal, seperti pendidikan kesetaraan yang tidak memiliki komite sekolah maka TPPK cukup beranggotakan dari unsur pendidikan. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu perlunya satuan tugas di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, membentuk satuan tugas untuk kewenangan satuan pendidikan tingkat SMA/SMK.

Untuk pendidikan khusus, pemerintah kabupaten/kota membentuk satuan tugas untuk kewenangan satuan pendidikan tingkat PAUD SD SMP dan pendidikan non formal. Kedua jenis satuan tugas ini bertugas untuk melaksanakan pembinaan pemantauan dan pengawasan pencegahan serta penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas berfungsi untuk melakukan pencegahan dan

penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya; Membina mendampingi dan mengawasi TPPK C memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan dinas terkait lembaga layanan ahli atau pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan eh memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum.

Kedua, pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan atau penetapan pengadilan dan; ketiga, koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan paling sedikit satu kali dalam tahun dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan menjadi tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani kekerasan. Dalam pelaksanaan tugas satuan tugas dapat berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Dinas Kesehatan atau dinas terkait lainnya, seperti psikolog dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Pekerja Sosial unit pelaksana teknis kementerian



pada daerah setempat perwakilan organisasi masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan atau bidang penanganan kekerasan dan atau pihak lain yang diperlukan dalam penanganan kekerasan sedikit berbeda dengan anggota TPPK keanggotaan satuan tugas berjumlah ganjil dengan minimal lima orang, terdiri atas unsur perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi pendidikan perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang Perlindungan Anak.

Kemudian, perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial dan organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak persyaratan untuk bergabung menjadi anggota TPPK maupun Satgas, antara lain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang maupun berat.

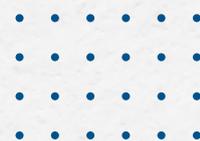
Baik anggota TPPK maupun Satgas akan berakhir masa keanggotaannya apabila tugas anggota TPPK atau Satgas berakhir, yaitu dua tahun bagi TPPK dan 4 tahun. Bagi Satgas meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

misalnya terbukti melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yang dilakukan satuan tugas menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan.

Untuk anggota TPPK yang berhalangan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pindah tugas atau mutasi TPPK dan satuan tugas berperan sangat penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Karena itu komitmen aktif dari satuan pendidikan pemerintah daerah anggota TPPK satuan tugas serta seluruh lapisan masyarakat akan memberikan dukungan yang kuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.

Satuan pendidikan sudah seharusnya menjadi tempat yang aman nyaman dan menyenangkan di mana setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan merasa dihargai dan diberdayakan untuk berkembang secara optimal. Karena tanpa perasaan aman, akan sulit mewujudkan pendidikan yang berkualitas seperti yang diharapkan bersama agar anak-anak kita memiliki daya saing global.

Akhirnya, mari gerak bersama menciptakan satuan pendidikan yang inklusif berkebhinekaan dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita Merdeka belajar Merdeka beragam setara.



BEASISWA NON GELAR

Kapasitas Guru Meningkatkan, Mutu Pendidikan Terangkat



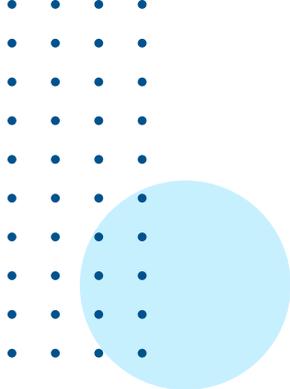
Guru merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Berhasil atau gagalnya pendidikan ditentukan oleh guru. Karena itu meningkatkan kapasitas guru menjadi salah satu strategi mewujudkan pendidikan yang bermutu. Maka dari itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan berbagai cara untuk mengkatrol kualitas guru. Salah satunya melalui program Beasiswa Non Gelar. Ini adalah beasiswa bagi guru-guru untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Kemendikbudristek memastikan kesempatan yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kapasitas yang sejalan dengan cita-cita mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam diskusi Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk 'Peningkatan kapasitas Guru melalui Beasiswa Non Gelar' yang diadakan Kamis, 2 November 2023, sejumlah guru yang telah mendapatkan program Beasiswa Nongelar yang diberikan

Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bersama Santi Ambarukmi, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek, berbagi pengalaman.

Seperti dikatakan Santi, sekarang kita berada di era digital yang penuh tantangan. Kemendikbudristek menyodorkan beberapa program dan juga menyiapkan sarana dan prasarana bagi guru-guru ataupun tenaga kependidikan demi bisa melayani dengan sebaik-baiknya peserta didik, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan pendidikan tinggi di era digital ini.

Guru dan tenaga kependidikan harus terus mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan sehingga Kemendikbud bisa memastikan bahwa guru-guru tersebut mendapatkan layanan yang sama untuk di seluruh Indonesia.



Syahrir, Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin, Alumni peserta program Up Skilling dan Resilling Manajemen, mengikuti program beasiswa agar tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. "Kebutuhan keterampilan yang diperlukan bertambah, baik di perusahaan sehingga perlu adanya update teknologi, baik itu *hardware* maupun *software*," ucapnya.

Guru lainnya yang telah mendapatkan kesempatan ikut program Beasiswa Non Gelar, Raden Nur Tsawaabit Fahim Yasin, Guru SMA Daar El Qolam 2 Tangerang, menuturkan bahwa semua guru seperti dirinya punya kesempatan yang sama mendapatkan program Beasiswa Non-Gelar.

Nur yang merupakan alumni program Microcredentialia CSSOX di Harvard University, Amerika Serikat ini, menuturkan pengalamannya sebelum, selama dan setelah mengikuti program beasiswa. "Saya mencari tahu apa kira-kira yang cocok. Saya melihat program Microcredentialia CSSOX ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan saya yaitu guru Teknologi Informatika dan Komunikasi," ujarnya.

Selama ini Nur memang selalu berupaya meningkatkan kapasitas diri agar bisa memberikan pembelajaran yang tepat dan efektif bagi peserta didik. Maka begitu mendapat informasi program Beasiswa Non-gelar, ia mendaftarkan diri dan mengikuti alur prosesnya, mulai dari menyiapkan berkas, seleksi, dan wawancara.

Syahrir mengungkapkan dia belajar tentang topik yang berkaitan dengan manajemen strategis, mengelola sumber daya manusia. "Saya memperoleh materi manajemen kurikulum manajemen mutu manajemen teknologi informasi. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi dengan para narasumber yang luar biasa yang ahli di bidangnya," tutur Syahrir.

Salah satu hal yang paling dia sukai dari kegiatan ini adalah praktik dan kunjungan ke sekolah yang luar biasa bagus. "Saya ingin mencoba bahwa apa yang saya peroleh dari kegiatan ini akan saya terapkan untuk di sekolah saya sendiri," katanya.

Peningkatan Kapasitas Guru Melalui Beasiswa Nongelar

NARASUMBER

KAMIS, 2 NOVEMBER 2023
15.30 - 17.00 WIB

REGISTRASI
<https://s.id/smb2nov>

Santi Ambarukmi
Direktur
Guru Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbudristek

Syahrir
Kepala SMKN 5 Banjarmasin
Alumni Peserta
Program Upskilling/Reskilling
Manajemen Kepala SMK
Berstandar Industri Tahun 2023

R. Nur Tsawaabit F. Y.
Guru SMA Dar El Qolam 2 Tangerang
Alumni Peserta
Program Microcredentialia CSSOX
Universitas Harvard

Rossi Marinjani
Guru SDN Mekarsari 1 Depok
Alumni Peserta
Program Microcredentialia
Universitas Columbia

SIARAN LANGSUNG
KEMENDIKBUD RI

"Sertifikat tersedia untuk peserta yang terdaftar melalui aplikasi zoom"

kemendikbud.go.id | @kemendikbud | kemendikbud | kemendikbud | kemendikbud | kemendikbud

SMB
MERDEKA BELAJAR

MERDEKA BELAJAR

Program beasiswa telah meningkatkan kapasitasnya sebagai guru SMA. Harvard University tidak hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan bahan baku. "Jadi kita peserta alumni yang mengikuti program ini diberikan sumber belajar yang bisa kita terapkan di sekolah. Mereka mengajarkan kami *how to teach How to teach computer science* di sekolah kita masing-masing kira-kira itu," tuturnya.

Nur merasakan perubahan. Ia merasa sebagai seorang guru harus terus berkembang memperluas potensi diri dan mencapai tujuan, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang merdeka, manusia yang dapat berdiri di kedua kakinya sendiri.

Rossi Marinjani, Guru SDN Mekarsari 1 Depok, yang mengikuti Program Microcredentialia Columbia University Columbia, mengatakan banyak sekali manfaat mengikuti program beasiswa ini. "Saya mengikuti program microcredentialia di bidang literasi dari berbagai program yang ditawarkan yang paling sesuai dengan kebutuhan saya di sekolah dan sesuai juga dengan passion dan minat saya," tuturnya.

Dari program tersebut Rossi mendapat wawasan baru. Materi-materi yang dia dapat dari program tersebut telah mengoreksi konsepsinya yang salah tentang literasi. "Setelah mendapatkan pemahaman yang benar yang tepat, tentang literasi, kita akan dapat mengembangkan keterampilan literasi," ujarnya.

Selain mendapatkan materi dari pengajar-pengajar Columbia University, Rossi juga mendapat materi dan belajar dari fasilitator-fasilitator nasional yang luar biasa.

Pembentukan TPPK di Sekolah-sekolah

Sebagian sekolah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Sebagian yang lain masih tahap sosialisasi. SMAN 34 Jakarta misalnya. Sekolah yang berlokasi di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan ini, telah membentuk TPPK setelah ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan.

Menurut Dwi Harmelia, Kepala Sekolah SMAN 34, TPPK yang merupakan amanat Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 yang diluncurkan pada Agustus 2023 yang lalu, hanya menguatkan. Karena, menurutnya, setiap sekolah sudah mempunyai aturan untuk mencegah dan menangani kekerasan yang juga merujuk kepada peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Anggota TPPK SMAN 34 sebanyak 15 orang, terdiri dari berbagai unsur, yakni guru, guru konseling, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan humas (Saprashum), tenaga administrasi, dan orangtua murid.

"Bagi kami, pembentukan TPPK bukan soal mendesak atau tidak untuk dibentuk. Melainkan perlu dilakukan untukantisipasi supaya jangan sampai kejadian kekerasan terulang lagi," ucapnya kepada *Majalah SMA*, Senin, 4 Desember 2023.

Bagaimana pun TPPK memang perlu agar guru-guru memiliki acuan yang sama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah. Dwi Harmelia melihat sejauh ini, pihaknya tidak menemui kendala dalam mengimplementasikan permen antikekerasan di sekolahnya.

"Setelah sosialisasi semua berjalan dengan baik, karena sebelumnya sekolah kami sudah mempunyai aturan dan program pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 menjadi payung hukum yang makin menguatkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Permen ini memang harus terus disosialisasikan," tuturnya.

Sementara itu SMAN 9 Tangerang, Banten, adalah salah satu sekolah yang belum membentuk TPPK. Seperti kita ketahui TPPK merupakan poin penting Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Permendikbud PPKSP) di lingkungan Satuan Pendidikan.

Menurut Vedia, guru di sekolah tersebut, sekolah tempatnya mengabdikan baru tahap sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. "Sosialisasi diberikan oleh kepolisian karena kebetulan sekolah kami belum lama ini terlibat tawuran," ujarnya.

Vedia mengatakan, sebenarnya Permendikbudristek Nomor 46/2023 bagus, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman secara menyeluruh. "Siswa diberi sosialisasi tapi guru atau tenaga kependidikan tidak, maka ada ketimpangan. Bahkan kadang karena tidak menyentuh secara menyeluruh maka tidak mustahil siswa masih ada yang mendapat kekerasan meski hanya bersifat verbal atau tindakan tidak menyenangkan dari gurunya sendiri," tuturnya.

Selama ini pihak sekolah SMAN 9 Tangerang memberikan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan berupa poin dan hukuman. "Ini masih berlangsung hingga kini. Padahal jika dikaitkan dengan Pendidikan Guru Penggerak (PGP) jelas ini bertentangan. Dalam PGP yang disiapkan untuk implementasi Kurikulum Merdeka sebaiknya penanganan terhadap siswa bermasalah adalah dengan melakukan segitiga restitusi, karena sebenarnya guru bukan penghukum. Guru harusnya tahu bagaimana memberdayakan siswanya. Sayangnya ilmu ini tidak tersampaikan dengan baik," tuturnya.

Vedia mendukung diterbitkannya Permendikbud PPKSP, tinggal diperlukan sosialisasi secara menyeluruh dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Sedangkan di SMAN 1 Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dilakukan oleh pengawas sekolah dalam rapat dinas sekolah, selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala sekolah membentuk TPPK. "Pembentukan TPPK di sekolah kami tidak ada kendala. TPPK dapat dibentuk dengan lancar sesuai hasil musyawarah mufakat," ujarnya.

Sunarto, guru bahasa Jerman SMAN 1 Ngadirojo, berpedapat, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sangat penting. "Karena menjadi pedoman bagi guru di sekolah dalam rangka meminimalisir terjadinya kekerasan di sekolah. Jadi sangat penting untuk proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik," ucapnya.



**Dwi Harmelia, S.Pd.,
M.Biomed.**

Kepala SMAN 34 Jakarta



Dr. Vedia, M.Pd.

Guru SMAN 9 Tangerang



Sunarto

Guru Bahasa Jerman
SMAN 1 Ngadirojo



Sri Hartati

Kepala Sekolah SMAN 6
Bengkulu Selatan

Selama ini sekolah selalu memilih langkah persuasif dan pendekatan secara personal dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. "Guru bimbingan konseling dan wali kelas yang menjadi tokoh yang paling berperan dalam menyelesaikan kasus kekerasan di sekolah," ucapnya.

Sebagai guru, Sunarto melihat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sangat tepat dikeluarkan dan menjadi salah satu solusi untuk permasalahan pendidikan yang akhir-akhir ini memprihatinkan akibat terjadinya kekerasan/bullying yang dilakukan oleh oknum pendidik maupun peserta didik di lingkungan sekolah.

Hal yang sama dikatakan Sri Hartati, Kepala Sekolah SMAN 6 Bengkulu Selatan. Karena itu, sekolah yang berlokasi di Jalan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ini, telah mengeluarkan Surat Keputusan TPPK pada Kamis, 5 Oktober 2023. "TPPK SMAN 6 Bengkulu Selatan terdiri dari sembilan orang, masing-masing mewakili pendidik, komite sekolah, perwakilan orang tua murid, dan tenaga administrasi" katanya.

Tantangan dan Peluang Kurikulum Merdeka

Ada pun terkait Kurikulum Merdeka, Dwi Harmelia melihat kurikulum ini sesuai dengan perkembangan. Kurikulum Merdeka menjadikan peserta didik sebagai fokus dalam proses pembelajaran. "Sekolah kami sudah menerapkannya dan hasilnya lebih baik," ucapnya.

Sementara Vedia mengatakan di sekolahnya penerapan Kurikulum Merdeka masih berjalan seadanya. Pemahaman Kurikulum Merdeka belum secara menyeluruh dan substansi, masih hanya kulitnya. "Belum terlihat nyata karena penerapannya yang belum maksimal. Padahal Kurikulum Merdeka sangat berpihak kepada siswa. Kurikulum Merdeka menghendaki pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Pembelajaran tidak dipaksakan harus sama semua," katanya.

Vedia melihat salah satu kendala belum maksimalnya pelaksanaan Kurikulum Merdeka justru ada pada para stakeholder. "Belum ada kemauan dari stakeholder untuk lebih serius mempelajari lebih jauh tentang Kurikulum Merdeka. "Guru-guru hanya diberi bekal sangat sedikit tentang Kurikulum Merdeka. Saya secara pribadi pernah mengusulkan untuk diadakan

workshop tentang Kurikulum Merdeka, namun sejauh ini tidak ditanggapi," ucapnya.

Sebagai guru Vedia melihat Kurikulum Merdeka bagus, hanya saja penyebarannya terfokus ke sekolah penggerak. "Sekolah lainnya dibiarkan menyelenggarakan sendiri tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga pemahamannya sangat bergantung kepada kepedulian dari stakeholder-nya. Jika dari stakeholder-nya sekadar memenuhi standar maka berjalannya Kurikulum Merdeka sepertinya hanya sebatas nama," ucapnya.

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Ngadirojo dimulai sejak 2022 pada peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 (kelas X), sedangkan peserta didik kelas XI dan kelas XII masih menerapkan Kurikulum 13 (K13).

"Sekarang, sejak Juli 2023 Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas X dan kelas XI, sedangkan kelas XII masih menerapkan kurikulum K13. Hasil penerapan Kurikulum Merdeka yang paling terlihat pada peserta didik adalah kemandirian peserta didik dalam belajar. Peserta didik lebih leluasa dalam menyelesaikan proyek belajar karena peserta didik diberikan kebebasan untuk menyelesaikan proyek belajar," tuturnya.

Menurut guru bahasa Jerman tersebut, perbedaan signifikan adalah metoda pembelajaran Kurikulum Merdeka menggunakan proyek belajar untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran yang diampu. "Peserta didik mengerjakan proyek belajar sesuai kemampuan dan sesuai sumber daya belajar yang dimiliki," katanya.

Kendalanya yang dihadapi sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah banyak peserta didik belum siap dengan model belajar Kurikulum Merdeka, "Meningkat mereka adalah hasil (*output*) dari Kurikulum 13, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan model belajar yang sekarang," katanya.

Selain itu, guru-guru belum menguasai sepenuhnya bagaimana mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran sehingga masih mengkombinasikannya dengan K13. "Kendala selanjutnya ada pada fasilitas belajar yang belum memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama internet dan alat praktek," tuturnya.

Peringatan Hari Guru Nasional sebagai Ruang Apresiasi

Peringatan 'Hari Guru Nasional' yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) tahun ini pada Jumat, 24 November 2023, terasa lebih mengharukan. Karena bukan hanya dihadiri oleh 4.500 guru dari seluruh Indonesia, tapi juga karena Peringatan 'Hari Guru Nasional' tahun ini mungkin akan menjadi tahun terakhir Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.



Pada kesempatan itu Mas Menteri mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia yang telah bersama-sama membuat perubahan dalam arah pendidikan Indonesia.

“Saya yakin dan optimis, bapak dan ibu guru sebagai nahkoda pendidikan tidak akan membalikan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Saya optimis seluruh guru dan pendidik di Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar,” kata Mas Menteri.

Menurut Mas Menteri, keyakinan ini tumbuh dengan banyak hal yang telah kita capai bersama dalam empat tahun terakhir, antara lain pada tahun pertama Merdeka Belajar kita menghapus Ujian Nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya; kita menerapkan Asesmen Nasional agar fokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid; Kita juga meluncurkan Kurikulum Merdeka. Jika Asesmen Nasional mengukur tujuan dari perubahan pendidikan, maka Kurikulum Merdeka yang menunjukkan jalan mencapai tujuan.

Menteri Nadiem juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, karena tanpa dukungan penuh Presiden RI, kebijakan-kebijakannya tak akan dapat berjalan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungannya sangat besar bagi saya dalam membuat berbagai kebijakan,” katanya.

Peringatan HGN yang tahun ini mengusung tema ‘Bergerak Bersama Rayakan Kemerdekaan Belajar’ juga menjadi ruang apresiasi yang diberikan kepada para guru atas semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam Merdeka Belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, meminta



kita bersama-sama memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para guru-guru Indonesia yang selalu belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan semangat Merdeka Belajar, serta telah berjuang untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid.

Menyemarakkan HGN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusung tiga pesan kunci. Pertama, HGN menjadi sarana dalam mengapresiasi, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi antar sesama guru. Kemendikbudristek memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para guru semangat belajar,





berbagi, dan berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik.

Kedua, berkaitan dengan capaian dan dampak positif. Peringatan HGN menjadi sarana untuk saling bercerita tentang capaian dan dampak Merdeka Belajar bagi guru maupun bagi peserta didik, khususnya dalam mendukung pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. "Hal ini dapat memberikan inspirasi kepada guru lain untuk terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan melalui berbagai program Merdeka Belajar serta menunjukkan kepada generasi muda bahwa jadi guru itu sangat keren dan membanggakan," tutur Nunuk Suryani.

Ketiga terkait dengan keberlanjutan. Pada kesempatan ini, Kemendikbudristek mengimbau seluruh ekosistem pendidikan untuk terus bergotong royong dan saling menguatkan. Dengan demikian, belajar dan berbagi akan menjadi gerakan pendidikan bagi para guru. "Siapapun presiden, menteri, kepala dinas atau apapun perubahan struktural yang terjadi, keberpihakan kepada murid, budaya untuk terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi tidak akan pernah berubah dan padam," tegas Dirjen Nunuk.

Apresiasi GTK Tahun 2023 untuk Inovasi dan Inspirasi

Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan sebuah upaya Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK untuk memberikan penghargaan kepada GTK dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing guna menstimulasi GTK dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Apresiasi diberikan kepada GTK yang melakukan

inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi. Di samping itu, apresiasi juga diberikan kepada guru yang menjadi idola/panutan/favorit siswa.

Kategori Apresiasi GTK yaitu GTK Inovatif, GTK Dedikatif, GTK Inspiratif, dan Terima Kasih Guruku.

Tema Apresiasi GTK Tahun 2023 adalah "Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka".

Tujuan Apresiasi GTK adalah 1) Memilih dan menetapkan GTK yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka; 2) Memberikan apresiasi kepada GTK atas praktik baik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka; serta 3) Memperoleh praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pelaksanaan administrasi sekolah, penatalaksanaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan sekolah, pengelolaan satuan PAUD, dan pengimbasan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Peserta program apresiasi GTK Tahun 2023 meliputi GTK di bawah binaan Kemendikbudristek, termasuk yang bertugas di Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (SPILN), yang terdiri atas guru, pendidik paud, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, kepala satuan paud, pamong belajar, guru pembimbing khusus, dan peserta didik.





**MERDEKA
BELAJAR**

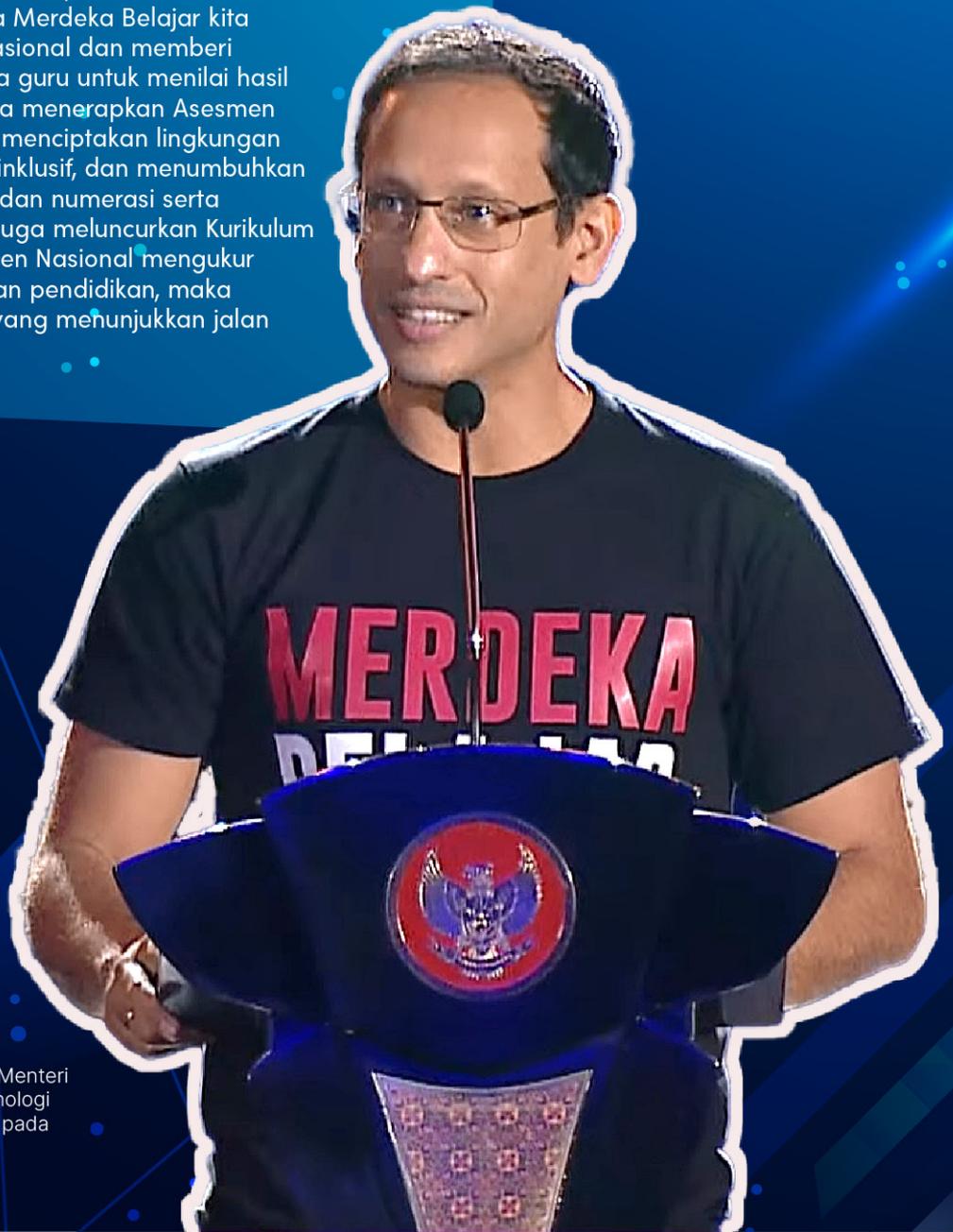


“

Tahun ini mungkin menjadi tahun terakhir saya merayakan peringatan Hari Guru Nasional sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek RI).

Hal ini membuat saya sedih, tetapi saya yakin dan optimis, bapak dan ibu guru sebagai nahkoda pendidikan tidak akan membalikan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Saya optimis seluruh guru dan pendidik di Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar.

Keyakinan ini tumbuh dengan banyak hal yang telah kita capai bersama dalam empat tahun terakhir, antara lain pada tahun pertama Merdeka Belajar kita menghapus Ujian Nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya; kita menerapkan Asesmen Nasional agar fokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid; Kita juga meluncurkan Kurikulum Merdeka. Jika Asesmen Nasional mengukur tujuan dari perubahan pendidikan, maka Kurikulum Merdeka yang menunjukkan jalan mencapai tujuan.



Pidato terakhir Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek RI) pada peringatan Hari Guru Nasional 2023.



Harumkan Nama Indonesia di Jepang lewat Program Tokyo Metropolitan Board of Education

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengirim sebanyak 12 orang peserta didik SMA dan SMK ke Jepang untuk mengikuti program Tokyo Metropolitan Board of Education (TMBoE). Ini merupakan program kerja sama Kemendikbudristek dengan Tokyo Metropolitan Board of Education (TMBoE).

Program yang ditawarkan oleh TMBoE terdiri atas dua skema, yaitu program *outbound* (siswa Tokyo ke Indonesia) dan program *inbound* (siswa Indonesia ke Tokyo, Jepang). Program ini merupakan ikhtiar pemerintah Indonesia dan Jepang untuk mempererat persahabatan di antara kedua negara melalui pendidikan.

Program *inbound* dilaksanakan 18 s.d. 25 November 2023 di Tokyo, Jepang. Dalam program ini delegasi dari Indonesia berkunjung ke SMA di Jepang untuk bertukar pengetahuan budaya masing-masing negara, diskusi, bertukar wawasan dengan siswa Jepang, dan merasakan kebudayaan

di Jepang dengan mengunjungi tempat-tempat budaya.

Sebagai pembekalan untuk peserta, Direktorat SMA menggelar kegiatan bertajuk Predeparture TMBoE yang diselenggarakan di Hotel Grand Whiz Points, Jakarta, 16-18 November 2023. Para peserta diberi pengetahuan dan panduan untuk menjalani program TMBoE. Salah satu pemateri dalam kegiatan departure TMBoE adalah dr Vivid F Argarini. Vivid memotivasi peserta menjadi *student exchange*.

Pemateri lain, Teuku Omar Tama Aldrian, peserta Sakura Science High School Program. Omar berbagi pengalamannya saat mengikuti program ke Jepang. Selain itu peserta diberikan pengenalan Bahasa Jepang yang disampaikan Aprilia Eka Putri Dwi Mutiara.

Plt Direktur SMA Kemendikbudristek Winer Jihad Akbar dalam sambutannya yang disampaikan Kasubag TU Budi Suprpto berpesan, selama di



Jepang, para peserta diharapkan menjaga nama baik Indonesia.

"Kalian berkunjung ke sana (Jepang) bukan atas nama pribadi, melainkan membawa nama bangsa. Oleh karena itu, selama di dalam kunjungan, jaga nama baik bangsa kita. Hargai budaya lokal. Kalian harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak," ujarnya.

Hal yang tak kalah penting, para siswa harus tetap menjaga kesehatan, "Suhu di sana lebih dingin. Jaga Kesehatan fisik. Bila perlu, bawa bekal obat-obatan," imbuhnya.

Sementara itu penanggungjawab program TMBBoE Windu Astuti menerangkan, TMBBoE merupakan program yang digelar untuk kali pertama.

Para peserta dengan tiga orang pendamping diberangkatkan pada Sabtu malam, 18 November dan akan berada di Jepang selama satu pekan.

Dikatakan Windu, selama dalam kunjungan para peserta akan berkunjung ke tiga sekolah. Selain itu, mereka juga berkesempatan mengunjungi atase kebudayaan di sana.

"Para peserta akan memperoleh pengalaman yang tak akan didapat sebelumnya. Di sana mereka akan berinteraksi dengan siswa lintas negara, meningkatkan pengetahuan, dan saling mengenal budaya masing-masing. Yang menarik, para peserta juga akan memperkenalkan sejumlah permainan tradisional Indonesia kepada siswa Jepang," ujarnya.

Dia menambahkan, para peserta juga diminta mempresentasikan soal isu pemanasan global yang saat ini sudah menjadi isu internasional, "Mereka akan menyampaikan solusi alternatif dalam rangka mencegah terjadinya pemanasan global," terang Windu.

Windu berpesan agar selama di Jepang para peserta tetap bersemangat dalam mengikuti program TMBBoE, "Ini kesempatan langka. Tidak

semua siswa mendapat kesempatan emas seperti ini," ujarnya.

Para peserta didik yang mengikuti program TMBBoE, adalah mereka yang terpilih berdasarkan kriteria yang diterapkan Kemendikbudristek. "Umumnya, yang terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Jepang, serta memiliki keterampilan di bidang seni, seperti menyanyi dan menari," kata Windu.

Para peserta didik SMA yang berkesempatan mengikuti program TMBBoE, menyampaikan kesan senada bahwa program ini sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini seperti disampaikan Made Indira Pradnya Paramita. Menurutnya, menjadi salah satu peserta TMBBoE adalah pengalaman yang tak akan terlupakan.

Peserta lain, Reavant Arvandho Subekti mengaku bersyukur akhirnya berkesempatan mengunjungi Jepang. Baginya, Jepang adalah negeri yang menjadi impiannya. Hal senada diungkapkan Fahry Dzaky Dwianada, siswa SMAN 6 Depok, Jawa Barat. Dia tak menyangka jika dirinya terpilih menjadi salah satu peserta. "Mengikuti TMBBoE, berarti menambah pengalaman dan memperoleh teman baru. Pokoknya seru," ujarnya.

Nabil Annasai Yusuf, peserta dari SMAN 7 Bekasi Jawa Barat mengaku senang bisa terpilih menjadi peserta TMBBoE, "Saat diberitahu saya terpilih, saya bilang 'wow' karena saking senangnya," ungkapnya.

Peserta lain, Nararya Zuhi Parabhawa dari SMAN 61 Jakarta Timur mengajak teman-teman sesama siswa/siswi SMA agar melatih kemampuan berbahasa asing. Menurutnya, dia terpilih dalam program ini, salah satunya karena memiliki keterampilan dalam berbahasa asing.

Demikian juga yang disampaikan, Anindita Kushala Pangarso, dari SMAN 6 Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa kemampuan berbahasa akan sangat bermanfaat, terlebih dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini.



Sekolah Sehat sebagai Langkah Membentuk Karakter

Sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik. Karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu di sekolah, untuk belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pembentuk karakter.

Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa kesehatan menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Untuk itulah Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui Sekolah Sehat untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter.

Saat meluncurkan program tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak pemerintah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan bergotong royong untuk merevitalisasi UKS sebagai upaya promosi kesehatan warga sekolah.

Secara umum, Sekolah Sehat diwujudkan melalui enam tahap, yaitu penguatan regulasi, optimalisasi peran tim pembina UKS, sosialisasi, publikasi dan advokasi. Kemudian pembinaan dan pendampingan ke satuan pendidikan, berikutnya integrasi Data Status Imunisasi Peserta Didik dalam Dapodik, dan kerja sama/kemitraan.



Untuk menjadikan Sekolah Sehat sebagai gerakan yang massif dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dipercaya dapat mewujudkan melalui program-program kreatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing di sekolah.

Melalui program Sekolah Sehat, SMAN 19 Medan mengimplementasikan berbagai macam program kreatif bersama siswa untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah sehat salah satunya dengan mengadakan senam sehat di lingkungan SMAN 19 Medan dengan menggandeng mitra pembelajar yaitu Universitas Terbuka Medan. Kegiatan ini dilakukan sebagai implementasi Sekolah Sehat dan sebagai bentuk penanaman karakter disiplin kepada peserta didik.

Selain program senam sehat, ada juga proram kantin sehat yang di mana kantin SMAN 19 Medan sudah mulai menerapkan dan membatasi jajanan siswa yang mengandung gula, saus, minyak dan sebagainya sebagai rangkaian menciptakan peserta didik yang sehat melalui makanan. Selain itu juga sekolah yang baik harus memiliki lingkungan yang asri agar setiap pembelajaran yang dilakukan di sekolah semakin nyaman juga tenang. Oleh karena itu SMAN 19 Medan melakukan gerakan penghijauan bersama siswa yang dimana setiap siswa membawa satu tanaman kecil untuk diletakkan di sudut sekolah sebagai gerakan penghijauan.

Selain itu SMAN 19 Medan yang berlokasi di Jalan Seruwai Nomor 1, Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, ini juga

memiliki taman apotek hijau yang berisi berbagai macam tanaman obat sebagai pembelajaran siswa dan juga sebagai ruang terbuka hijau untuk menjamin terpenuhi pasokan oksigen di lingkungan SMAN 19 Medan. Program lainnya yang diselenggarakan oleh SMAN 19 Medan adalah semangat untuk mengurangi sampah ini terlihat dengan disediakannya tempat sampah secara memadai di lingkungan sekolah dan memberikan sosialisasi berkala kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah untuk tetap bersih, nyaman, aman dan juga sehat.

Di dalam upaya peningkatan kesehatan peserta didik di sekolah SMAN 19 Medan berusaha menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah. Kedua faktor ini dapat diupayakan di sekolah dengan melibatkan berbagai pihak dan juga mitra yaitu masyarakat sekolah, Komite Sekolah, Instansi Kesehatan, Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan instansi-instansi lain yang terkait.

Karena tanpa ada kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, maka sekolah sehat akan sulit tercapai. Dengan demikian program Sekolah Sehat yang sedang diupayakan oleh SMAN 19 Medan dapat menjadi media pembelajaran khususnya peserta didik untuk membentuk karakter unggul, terampil, mandiri, juga agamis dengan didukung lingkungan sekolah yang asri juga sehat akan segera terwujud.

SMA NEGERI 4 MALUKU TENGAH

Kurikulum Merdeka Menggelorakan Semangat Berkarya



Kurikulum Merdeka terbukti meningkatkan kemampuan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Demikian juga guru-guru, mereka menjadi lebih terdorong untuk fokus melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai minat dan bakatnya.

Jusuf Tuaewa, Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah, menjelaskan, sekolahnya telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak dua tahun yang lalu. "Selama dua tahun melaksanakan Kurikulum Merdeka banyak sekali kemajuan yang dirasakan oleh guru-guru dan peserta didik di sekolah kami," ujarnya.

Menurut Jusuf, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik meningkat. Dalam proses keseharian ia menyadari bahwa bakat dan minat yang ada pada siswa tentu harus dikembangkan di lembaga pendidikan ini lewat berbagai aktivitas di sekolah yang di desain oleh guru-guru.

"Saya berharap ke depan prestasi ada minat yang ada pada siswa itu mereka bisa memiliki prestasi yang kemudian itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang," tutur Jusuf.

Edison R. Luturnas, guru SMAN 4 Maluku Tengah, terdorong untuk mengali kompetensi sehingga sebagai guru, ia dapat mengetahui keunikan dan kemampuan atau

Edison R Luturnas,
Guru SMAN 4 Maluku Tengah

potensi para peserta didiknya yang berbeda-beda. Mereka ada yang senang dalam menggambar, ada yang senang dalam menyajikan PowerPoint ada juga yang senang dalam melukis, ada juga yang senang dalam membaca puisi.

"Inilah keunikan yang dimiliki oleh anak-anak kami. Dari keunikan ini kami menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kami sehingga anak-anak kami dapat menampilkan keunikan mereka sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik kami," tutur Edison yang sudah 14 tahun mengabdikan diri di SMAN 4 Maluku Tengah.

SMAN 4 Maluku Tengah juga menerapkan tradisi yang ada di masyarakat Maluku, tradisi yang disebut tanpa garam, tanpa garam adalah piring kecil yang berisi garam dan cabai rawit yang selalu ada di meja makan. Tanpa garam menjadi simbol kebersamaan keluarga di meja makan.

"Saat orang tua atau kepala keluarga akan memberikan nasehat dan petunjuk kepada anggota keluarganya tentang tuntunan hidup bahwa jika ada permasalahan dicarikan solusi secara bersama-sama, di meja makan," katanya.

Yosep Tetelepta, Guru Matematika SMAN 4 Maluku Tengah, mengatakan, Kurikulum Merdeka mengajarkan pada dirinya bahwa semua anak itu unik dan ia tidak boleh menghadapinya dengan cara yang sama. "Saya sebagai wali kelas selalu dekat dengan anak-anak. Di saat saya tidak memiliki jam pelajaran saya selalu ke kelas dan memberikan semangat. Bercerita sehingga mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka rasakan," tuturnya.



di saat saya tidak memiliki jam pelajaran, saya selalu ke kelas

Melalui Kurikulum Merdeka, Yosep belajar dan memahami bahwa seorang guru adalah sosok yang harus menjadi teladan dan inspirasi dan menjadi hamba bagi anak-anak peserta didik sehingga mereka merasakan bahwa guru adalah orang tua yang paling terdekat bagi mereka.

Brameldon Natha Mayaut, siswa kelas 11 SMAN 4 Maluku Tengah, merasa senang dengan adanya Kurikulum Merdeka. "Karena kami siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi materi yang diberikan untuk aktif dalam proses pembelajaran," ujarnya.

Kebebasan bagi siswa menemukan jalan untuk pembelajaran mereka sendiri yang paling tepat untuk masa depannya. Menurut Tania Nusaina Lailossa, siswi kelas 12 SMAN 4 Maluku Tengah, Kurikulum Merdeka lebih mendengar suara siswa. "Kurikulum Merdeka ini kami belajarnya itu nggak cuman guru menerangkan, tapi kami semua aktif membuat game. Itu menyenangkan banget buat temen-temen," tuturnya.

Game yang mereka buat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan acara menyenangkan, sehingga peserta didik terpacu untuk belajar. Firginsya Papuani Unmehopa, siswa kelas 12, mengatakan Kurikulum Merdeka membuatnya lebih kreatif.

Dian Martysya Namakule, siswi lainnya di SMAN 4 Maluku Tengah, mengaku Kurikulum Merdeka cukup menyenangkan karena pada kurikulum ini guru lebih berfokus pada potensi siswa sehingga minat dan bakat yang dimiliki oleh para siswa bisa lebih dikembangkan.

Elatsvega Intan Sinay, melihat Kurikulum Merdeka memberi ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri. Ruang belajar tidak hanya di dalam kelas. "Bisa belajar dengan santai, yang lebih suka musik kami bisa membawakan materi tersebut dalam bentuk lagu, kemudian kami yang suka menjelaskan kami bisa membuat video dan kami menjelaskan materi tersebut," akunya.

Dia merasa materi yang awalnya dianggap itu sulit, tetapi karena menggunakan metode-metode itulah membuat ia sangat bersemangat untuk mempelajari materi tersebut.

Kurikulum Merdeka menurut Sinay membuat belajar jadi lebih menyenangkan. Guru terfokus kepada kebutuhan siswa, mengeksplor segala minat dan bakat dalam bentuk kreativitas untuk diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari.

Jesica Jhorjian Mainassy pun merasa senang sudah melaksanakan banyak sekali tema kegiatan Poyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Para siswa dan juga para guru turun ke beberapa panti asuhan untuk menghibur mereka agar mereka tidak merasakan kesepian. "P5 ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa sehingga siswa lebih saling mengasahi lebih saling menyayangi dan lebih menerima adanya keberagaman dan perbedaan di dalam pertemanan," ujarnya.

Yosep,

Guru Matematik SMAN 4 Maluku Tengah



Sekolah Ramah Anak dan Duta Antikekerasan

Sebelum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, SMAN 34 Jakarta telah secara aktif melakukan pencegahan kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah.

Juli Sugiyati, Guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan tersebut, menjelaskan, SMAN 34 Jakarta memiliki program Duta Antikekerasan yang berbarengan dengan program Sekolah Ramah Anak.

Menurut Juli, program ini untuk melindungi peserta didik dari menjadi korban atau pelaku tawuran yang memang marak serta mencegah perundungan siswa junior oleh kakak kelas mereka. "Program itu secara aktif dilakukan anak-anak OSIS SMAN 34 Jakarta agar mereka punya rasa memiliki terhadap sekolahnya. Kami membuat program Duta Antikekerasan," katanya.

Pihak sekolah memilih Duta Antikekerasan melalui program Roots, yaitu sekolah membentuk agen perubahan sebanyak 10 siswa yang dipilih melalui google form. Dari 10 ini mereka diminta lagi menuliskan nama. Nama yang muncul paling banyak, dialah yang terpilih menjadi Duta Antikekerasan.

Program Sekolah Ramah Anak, salah satu bentuk edukasinya adalah pembiasaan senyum, salam, sapa. "Pembiasaan ini menjadi sangat positif dalam menciptakan chemistry satu sama lain, baik antarpeserta didik maupun antarpeserta didik dan guru serta tenaga kependidikan," katanya.

"Program Duta Antikekerasan ini *inline* dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023. Jadi semakin kuat, kami punya panduan



yang lebih rinci dan payung hukumnya," kata Juli yang juga mengikuti program Guru Penggerak.

Maka kalau kita bertandang ke SMAN 34 Jakarta, jangan heran akan mendapati suasana yang aman dan nyaman penuh dengan wajah-wajah yang dihiasi senyum, menyapa, dan memberi salam.

Mengucap salam, menyapa, tersenyum memang terdengar sepele, namun seperti telah dibuktikan warga sekolah SMAN 34 Jakarta, apabila sudah menjadi kebiasaan akan menciptakan kebahagiaan dan perasaan nyaman. "Kami memberi materi yang terkait dengan karakter peserta didik kita yang contoh sederhananya adalah



ketika ada terbentuknya TPPK ini kami langsung memasukkan pemahaman apa saja bentuk-bentuk kekerasan,” ujarnya.

Termasuk kalimat-kalimat candaan yang sebetulnya itu bentuk perundungan karena melukai perasaan. Materi antikekerasan disusun dengan melibatkan peserta didik. “Kami meminta masukan peserta didik apa saja ucapan atau tindakan yang bisa menyakiti,” katanya.

Guru BK memberi tahu dengan rinci apa itu *toxic friendship*, materi tidak disampaikan hanya melalui diskusi tetapi juga drama. “Bagaimana mereka menolak ajakan untuk menggunakan narkoba. Program unggulan kami adalah bimbingan baca Qur’an dan bimbingan Alkitab dan juga baris berbaris. Ini jadi program bimbingan kami, *one day one student* untuk mengikuti *coaching*,” tutur Juli.

SMAN 34 juga rutin menggelar seminar seputar topik kekerasan, pencegahan, dan penanganannya. Penyediaan sarana prasarana pencegahan kekerasan, SMAN 34 Jakarta memiliki CCTV untuk pemantauan, juga ada kotak pengaduan di website sekolah.

Ketika ada laporan ada oknum guru yang membully dengan menggunakan kata-kata seperti ‘bego’, ‘bodoh’ dan sebagainya, pihak sekolah akan menerima laporan tersebut, mengumpulkan data, untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Bila benar terbukti, maka akan menyampaikan kepada sekolah untuk diambil tindakan.

“Bukan hanya itu, penanganan kekerasan untuk kasus perundungan seperti itu, kami melakukan pemulihan, dalam arti si pelapor bagaimana agar dia tetap percaya diri dan bagaimana si terlapor

juga tetap juga punya rasa kepercayaan diri dan tidak merasa bersalah atau merasa biasa kalau sudah dipanggil kepala sekolah dengan membuat BAP itu juga menjadi sesuatu yang hal yang berat,” tuturnya.

Tantangan menangani perundungan seperti itu adalah cara berpikir bahwa disiplin harus ditegakkan dengan kekerasan dan merasa bangga jika ditakuti peserta didik. Namun SMAN 34 Jakarta memiliki standar operasional (SOP) yang jelas untuk menangani kasus-kasus kekerasan.

“TPPK itu sangat penting banget di sekolah dan sangat memberikan manfaat buat rasa aman dan nyaman dan kita juga pendidiknya juga aman,” ucapnya.

Selain berinovasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, SMAN 34 Jakarta juga menerapkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Jangan heran sekolah ini mendapat predikat Green School. Wawasan lingkungan di sekolah ini bukan sekadar teori, melainkan betul-betul dipraktikkan, contohnya di kantin sekolah ini dilarang penggunaan styrofoam dan plastik untuk peralatan sekali makan.

Untuk makan dan minum kantin-kantin menggunakan gelas dan piring yang dapat dipakai berulang kali. Sekolah ini juga mempraktikkan hidup ramah lingkungan dengan membuat kebun, membuat kompos, dan pemisahan sampah organik dan nonorganik. Tak mengherankan SMAN 34 Jakarta program Sekolah Sehat Tingkat Nasional, dan memenangkan kompetisi Toyota Eco Youth.



Juli Sugianti
Guru Bimbingan Konseling
SMAN 34 Jakarta

Bebas Hambatan Bagai Jalan Tol

Mulus dan lancar, bebas hambatan bagai jalan tol. Demikian gambaran pelaksanaan program-program untuk pencegahan kekerasan di SMA Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

SMAN 1 Ketapang telah melaksanakan program Roots dan Disiplin Positif. Dengan program Roots, yakni program Garapan Pemerintah RI dan UNICEF yang bertujuan untuk mencegah perundungan, dibentuklah agen perubahan di SMAN 1 Ketapang. Agen perubahan yang dimaksud tak lain ialah para peserta didik. Sementara, program Disiplin Positif merupakan program penerapan kedisiplinan di sekolah, tanpa adanya hukuman atau kekerasan. Wahyu mengikuti pelatihan Disiplin Positif di tahun 2022, dan berkesempatan pula menjadi fasilitator Disiplin Positif.

"Kami menerapkan budaya disiplin positif untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman untuk warga sekolah, ini sudah masuk pada salah satu misi SMAN 1 Ketapang," ujar

Wahyu Purwaningsih, S.Pd., M.Psi., guru penggerak sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMAN 1 Ketapang.

Dalam gelar wicara bertopik 'Praktik Baik Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan', Senin, 13 November 2023, Wahyu menuturkan, tahun 2022 ia mengikuti pelatihan Disiplin Positif yang mengantarnya menjadi fasilitator Disiplin Positif lantas melaksanakan IHT (*In House Training*) di sekolah. Lewat IHT itu, Wahyu menularkan informasi terkait Disiplin Positif kepada teman-teman sesama guru di sekolahnya. Sedangkan untuk program Roots, pihaknya baru-baru ini mendapatkan pelatihan zoom. "Jadi pelaksanaan program Roots ini baru di sekolah, namun sudah berjalan dengan sangat baik," ungkap Wahyu.

Seperti halnya di sekolah lain, di SMAN 1 Ketapang pun para agen perubahan diwakili oleh peserta didik kelas X, XI, XII. Untuk memilih agen perubahan, semua murid diminta mengisi google form dengan menulis nama teman yang paling berpengaruh dalam kesehariannya. Setelah agen perubahan terbentuk, mereka membuat alur mekanisme pelaporan di SMAN 1 Ketapang. Jadi, peserta didik yang melakukan pelanggaran baik itu kategori ringan, sedang, maupun berat ini nantinya diajak berdiskusi. Bukan untuk dihukum, namun untuk dicari tahu penyebabnya. "Kategori pelanggaran bukan soal hukuman, tapi dengan siapa mereka akan diajak ngobrol. Pembinaannya, kalau pelanggaran ringan dengan guru atau dengan wali kelas. Kemudian





kalau pelanggarannya sedang maka akan naik pada guru BK, wali kelas, lalu siswa yang melakukan pelanggaran berat bisa ke guru BK, TPPK, wali kelas, kesiswaan, kepala sekolah atau komite ahli tangan kasus," papar Wahyu.

Di SMAN 1 Ketapang, Wahyu berupaya memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mencegah kekerasan di sekolah. Agen perubahan yang berjumlah 32 dari masing-masing kelas yang berinisiatif mengimbaskan pada teman-teman sekelasnya. Contohnya, mereka membuat kotak curhat, pohon harapan, mural dan poster antiperundungan di kelasnya. Untuk semua itu, mereka memanfaatkan uang kas kelas masing-masing.

Lantas, tampak jelaskah dampak program pencegahan bagi warga sekolah itu? Menurut Wahyu, dampaknya sangat kentara. Ia menyebutkan, peserta didik menjadi lebih peduli, lebih memahami dengan tindakan kekerasan/*bully* di sekitarnya. Sementara itu, anak-anak sudah memahami mana yang termasuk kategori perundungan, mana yang masuk kategori perilaku tidak tepat.

Menariknya lagi, peserta didik mulai berani melaporkan tindakan temannya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tak kalah keren, guru dan pihak sekolah menjadi lebih peduli dan lebih serius menanggapi laporan-laporan peserta didik dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Tentu saja, ini merupakan progres yang menggembirakan bagi kita semua.

Seperti apa sih awal mula Wahyu mengenalkan program-program pencegahan kekerasan di sekolah itu? Wahyupun memutar perjalanannya. Ia memulai pelaksanaan program Disiplin Positif dengan banyak sekali tantangan. "Namun tantangannya itu adalah ketidakpercayaan bahwa Disiplin Positif ini bisa berjalan dengan baik. Artinya, teman-teman di sekolah masih mempunyai *mindset* bahwa anak-anak harus dikerasin, harus dihukum, karena kalau tidak dihukum ini tidak akan ada perubahan," urainya.

Wahyu menyebutkan, di SMAN 1 Ketapang memang

sudah tidak ada lagi hukuman fisik. Hukuman yang diterapkan biasanya berupa pemanggilan orang tua, atau kalau terlambat masuk sekolah akan diminta untuk bersih-bersih lingkungan. "Namun setelah dilakukan IHT kemudian secara pribadi juga, karena saya kebetulan adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan jadi ketika ada teman-teman walikelas, teman-teman guru yang bermasalah dengan siswa, maka saya berikan masukan sedikit demi sedikit bagaimana mengaplikasikan Disiplin Positif ini untuk membimbing mereka," ungkap Wahyu.

Oleh karena Disiplin Positif ini berkaitan dengan karakter, maka tidak bisa serta-merta berubah dengan cepat. "Dengan teman-teman guru mau sedikit berubah, mau sedikit membuka wawasan tentang Disiplin Positif ini, saya sudah sangat bersyukur. Sampai hari ini, ini sudah berjalan dengan sangat baik," bebernya.

Kepada rekan-rekannya sesama guru, Wahyu menyampaikan bahwa program Disiplin Positif lebih ditekankan untuk para guru. Nantinya, peserta didiklah yang akan menerima manfaatnya. Nah, sedangkan pada program Roots ini, mereka mengaktifkan peran murid. "Jadi, kalau Dispo-nya jalan dari guru, kemudian Roots jalan, peserta didik membuat jaring positif kepada teman-temannya maka budaya positif itu akan berjalan dengan baik di sekolah. Jadi kalau Roots ini, saya tidak melihat kendala," tegas Wahyu.

Menurut Wahyu, dari semua itu yang paling penting adalah dukungan dari kepala sekolah. Beruntung, kepala SMAN 1 Ketapang, Sulaiman sangat mendukung program Disiplin Positif maupun Roots. Wahyu mengatakan, program-program yang dijalankan 'terselamatkan' karena kepala sekolahnya masih muda, memiliki *mindset* terbuka dan juga pengajar praktik yang di kemudian hari juga menjadi fasilitator guru penggerak.

Begitu pula komite sekolah, juga mendukung. Seluruh warga sekolah juga punya komitmen dan saling membantu. Jadi, semua dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Ibarat jalan tol, bebas hambatan.

VANIA PUTRI ARFANDA KURNIA
DUTA SMA NASIONAL BERBAKAT 2023

Menggali Potensi, Meraih Prestasi

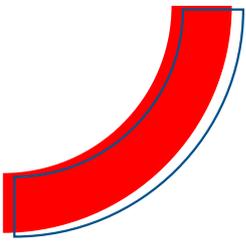
Anak muda memiliki potensi sangat besar untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Vania Putri Arfanda Kurnia sepakat dengan hal tersebut. "Pengaruh kita sebagai seorang pemimpin muda sungguhlah penting dalam menciptakan perubahan yang signifikan," ujarnya.

Namun potensi yang sangat besar itu hanya akan tinggal potensi apabila tidak ada upaya untuk menggalinya. "Kita para generasi muda punya potensi luar biasa untuk menciptakan perubahan yang besar. Kuncinya adalah selalu percaya pada diri dan pada kemampuan yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah meragukan diri sendiri, karena kita

mampu mengubah dunia di sekitar kita and create a better future for our generation," tuturnya.

Siswi Kelas 3 SMAN 2 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tersebut selalu bersemangat dalam menggali potensi dirinya dengan terus belajar dan melakukan hal-hal untuk meningkatkan kapasitas diri sekecil apa pun. "Aku percaya dengan fenomena butterfly effect , bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memiliki dampak yang besar jika dilakukan dengan sepenuh hati dan tekad yang kuat," ujar dara kelahiran Boyolali 22 Maret 2005.





Putri pasangan Arie Kurnia dan Siti Fathonah Purnaningsih, tersebut didapuk menjadi Duta SMA Berbakat dalam Program Duta SMA Nasional 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), September lalu. Ia mewakili Kalimantan Tengah yang lolos di program nasional.

Dia terpilih menjadi Duta SMA Berbakat Nasional berkat sederet prestasi yang diraihinya. Salah satu prestasi yang layak dibanggakan adalah Vania Putri Arfanda Kurnia terpilih mengikuti pertukaran pelajar internasional ke Amerika Serikat pada awal Agustus 2022. Prestasi tersebut tidak hanya membanggakan orang tua dan sekolahnya tapi juga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Vania merupakan satu dari empat siswi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta satu dari 70 pelajar Indonesia yang terpilih mengikuti program pertukaran pelajar internasional yang diselenggarakan Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES), sebuah program beasiswa penuh yang diberikan oleh U.S. Department of State kepada siswa SMA atau sederajat.

Program ini bertujuan menjembatani pemahaman dan saling pengertian antara masyarakat negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan dengan masyarakat Amerika Serikat. Program YES memberikan kesempatan untuk siswa yang aktif dan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.



Dalam program Vania bersama 69 pelajar Indonesia lainnya akan belajar selama 10 bulan di American Highschool yaitu Weathland Union Highschool di Plumas Lake, California, Amerika Serikat. Menurut Vania, ia mendaftar program tersebut pada H-7 penutupan pendaftaran. "Aku mendaftar melalui Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena belum dibuka untuk Kalimantan Tengah," katanya.

Ada 25 peserta yang terjaring, ada 11 peserta yang lanjut ke seleksi di tingkat nasional. Vania jadi salah satu peserta yang lolos ke tahap itu. "Saya juga tidak menyangka karena saat pendaftaran saja ternyata sudah sangat berat karena banyak banget berkas-berkas yang harus diisi. Saya tidak mengira kalau berkas itu akan ada sebanyak itu. Jadi untuk adik-adik yang ikut itu harus lebih mempersiapkan lagi berkas-berkasnya," ujar Vania.

Kendala sempat dialaminya karena sebelum tes wawancara, dia mengalami kecelakaan sehingga kesulitan berbicara lantaran menderita pergeseran rahang. Meski begitu dia berusaha semampunya dan akhirnya tahap ini bisa dilewati dengan baik.

Perjuangan semakin berat saat seleksi di tingkat nasional karena harus bersaing dengan peserta-peserta hebat dengan berbagai prestasi seperti atlet dan lainnya. Panitia memilih 75 peserta terbaik, kemudian menjaringnya lagi menjadi 70 orang yang terpilih. Vania sangat bersyukur karena termasuk dalam empat orang yang terpilih dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selama belajar di Amerika, Vania memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia

Sebagai Duta SMA Berbakat Nasional, Vania mengimplementasikan program dan semboyan Duta SMA untuk mendorong SMA di Indonesia termotivasi dan bisa melakukan hal-hal positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

MUHAMMAD IQBAL RAIHAN
SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Matematika adalah Solusi

Bila ada mata pelajaran yang paling ditakuti siswa, itu adalah Matematika. Tetapi itu tidak berlaku bagi Muhammad Iqbal Raihan (17). Ia menyukai matematika sejak SD. Ribuan jam ia habiskan untuk mengutak-atik soal-soal matematika. Letihnya belajar dan latihan soal selama ini, terbayar dengan perolehan medali perak pada OSN 2023 lalu.

Raihan merupakan pelajar kelas XII SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ia mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN 2023) bidang matematika tingkat SMA/MA pada akhir Agustus hingga awal September 2023 lalu di Bogor, Jawa Barat. Seperti halnya finalis lainnya, Raihan telah melewati serangkaian seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Pelajar kelahiran Temanggung, 12 Februari 2006 ini terkesan dengan OSN 2023. Yang sulit dan melelahkan bagi Raihan bukan perlombaannya, melainkan proses persiapan yang panjang. "Ribuan jam tercurah hanya untuk belajar. Ketika hari OSN tiba, malah semua beban di pundak saya rasanya hilang. Ketika mengerjakan soal-soal, saya tidak merasa gugup ataupun takut tidak berhasil. Saya justru merasa tenang dan percaya diri, tanpa rasa khawatir akan hasil





OSN-nya,” tutur pengagum Euklides (*Eukleidēs*), matematikawan Yunani asal Aleksandria, Mesir, yang hidup pada pertengahan abad ke-4 SM.

Raihan kagum pada Euklides atas pencapaian dan kontribusinya dalam matematika. Seberapa menarik Matematika di mata Raihan? “Menurut saya, yang menarik dari matematika adalah bagaimana kita dapat membuat suatu solusi yang memuaskan dari permasalahan-permasalahan yang rumit.”

Sosok yang paling berjasa dalam prestasi Raihan, menurut menurut pengakuannya adalah Siti Fauzanah. Siti Fauzanah yang dimaksud tak lain ialah Bu Yan, guru berusia senja dengan kehidupan yang sangat sederhana dan begitu peduli pada pendidikan khususnya matematika bagi anak-anak kurang mampu. “Ibu Siti Fauzanah, guru SMP saya. Tanpa beliau, saya tidak akan tahu apa itu olimpiade, lebih-lebih melangkah ke dalamnya,” ungkap Raihan, putra dari Gati Nurhidayati dan Yekti Toto Raharjo.

Setiap hari dari pagi sampai malam, Raihan belajar matematika dengan Sang Guru. “Setiap hari di tempat lesnya dari pagi sampai malam, tanpa ada waktu luang untuk bermain atau mencari kesenangan. Waktu SMA, saya selalu mencari waktu luang untuk belajar matematika,” ujar Raihan yang bercita-cita menjadi *computer scientist* yang dapat memberikan kontribusi besar kepada dunia.

Dari berbagai kompetisi sains yang ia ikuti, Raihan merasakan banyak manfaat. “Yang saya rasakan adalah hasil lomba-lomba yang saya ikuti sangat membantu saya dalam mendaftarkan universitas favorit, juga uang pembinaan yang saya dapat sangat membantu saya secara finansial. Secara pribadi, matematika telah membantu saya dalam berbagai hal, terutama dalam hobi baru saya, yaitu *programming*.”

Target selanjutnya di bidang matematika, Raihan ingin bisa mendapatkan medali di IMO, The International Mathematical Olympiad. IMO ke-65 tahun 2024 akan diselenggarakan di Britania Raya. Raihan yakin, dengan kesabaran dan pantang menyerah, ia mampu menaklukkan soal-soal Matematika. “Tantangan yang sering saya hadapi adalah sering *stuck* ketika mengerjakan suatu soal. Terkadang bisa sampai beberapa hari belum menemukan solusinya. Akan tetapi saya hanya perlu bersabar dan pantang menyerah,” tegas Raihan.

Untuk para pelajar lain, Raihan punya tips supaya menguasai matematika. Bagaimana caranya? Menurut Raihan, cara paling mudah adalah latihan soal. “Tidak seperti biologi atau sejarah, matematika tidak bisa dikuasai hanya dengan membaca ataupun menghafal. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam di matematika adalah dengan melakukan latihan soal,” pesannya.

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Politisi Betawi Pembela Rakyat



Tokoh kita kali ini sangat special: Mohammad Husni Thamrin atau lebih akrab dikenal sebagai MH Thamrin. Namanya disematkan sebagai nama jalan utama di ibukota. Dialah tokoh Betawi yang dekat dengan rakyat, memikirkan dan membela mereka.

Mohammad Husni Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 di tengah keluarga kaya. Ayahnya H. Thamrin Tharie berdarah Belanda sedangkan kakeknya dari pihak ibu (Hj. Nurhana) merupakan pengusaha Inggris yang punya hotel di bilangan Petojo. Meski ayahnya adalah seorang wedana di era pemerintahan kolonial, Thamrin justru menentang penjajah demi membela rakyat kecil.

Di samping menekankan pentingnya ilmu agama Islam, orang tua Thamrin juga menyekolahkan di sekolah khusus Belanda; Koning Willem III School te Batavia. Ia tidak dapat melanjutkan studinya karena sang ayah pensiun. Jadinya, Thamrin bekerja sebagai juru tulis di kantor kepatihan lalu kantor residen. Namun lantaran tak tahan dengan diskriminasi pemerintah Belanda terhadap pribumi yang dianggap sebagai warga kelas tiga, Thamrin pun berhenti dari pekerjaannya itu.

Kendati tidak melanjutkan pendidikan formal, Thamrin tetap memperkaya ilmu dan meluaskan wawasannya dengan banyak membaca. Selain rajin membaca berbagai referensi, MH Thamrin juga bergaul erat dengan kaum intelektual di zaman itu, di antaranya Van der Zee, Douwes Dekker. Pada para cendekiawan itu, Thamrin memperdalam ilmu politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Setelah berhenti kerja sebagai juru tulis, MH Thamrin mulai pekerjaan baru di perusahaan perkapalan bernama KPM (Koninglijke Paketvaart Maatscapaij) sebagai penjaga buku. Bagi masyarakat pribumi, pekerjaannya amatlah bergengsi. Ia bekerja di sana tahun 1914 dan 1924. Di tahun-tahun itulah, perubahan hidup Husni Thamrin terjadi. Thamrin semakin tertempa untuk lebih menghayati kehidupan masyarakat Betawi yang selalu tertindas dalam sistem kolonial.

Lambat laun, ia pun tumbuh menjadi sosok pemimpin dalam pergerakan nasional. Faktor terpenting dalam awal perubahan Thamrin kala itu ialah perkenalan dengan seorang anggota Dewan Kota Praja (Gemeenteraad) Batavia yang berbangsa Belanda, Van der Zee. Ketika bekerja di KPM itulah,

ia mulai akrab dengan politikus berhaluan sosialis itu. Dua orang yang berbeda kebangsaan itu kerap terlibat dalam dialog-dialog penuh antusias, masing-masing melontarkan ide dan perspektif hingga ada titik temu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya, Thamrin berempati pada masyarakat kecil yang langganan banjir Ciliwung. Akhirnya, Van der Zee menyampaikan persoalan itu dalam sidang Gemeenteraad Batavia. Gubernur jenderal lantas setuju untuk mengupayakan agar air Ciliwung tidak lagi mendatangkan bencana banjir, dengan membuat kanal supaya tumpahannya langsung mengalir ke laut.

Setelah beberapa waktu, Gemeenteraad Batavia membuka rekrutmen untuk anggota baru dengan Van der Zee sebagai ketua perkumpulan pemilih. Thamrin pun menggunakan kesempatan itu dengan baik. Pada 29 Oktober 1919, ia pun memulai karier politiknya sebagai seorang wakil rakyat di sana. Tujuh tahun berselang, ia menjabat sebagai Loco Burgomeester II (Wakil Walikota II) dan kemudian memegang jabatan loco Burgomeester I, hingga jabatan yang lebih tinggi lagi MH Thamrin menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat.

Ia terjun di dunia politik dan menjadikan politik sebagai jalan pengorbanan demi menjaga hak-hak masyarakat banyak. Baginya, berpolitik dilakukan agar hidup lebih bermanfaat untuk rakyat, bukan untuk mengejar kekayaan

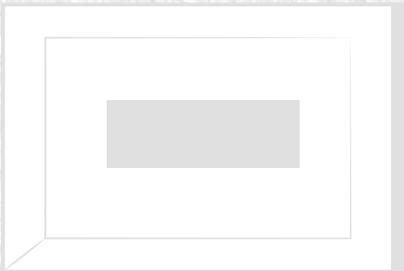
maupun kekuasaan.

Sia bertekad menaikkan derajat orang-orang lokal di tengah gempuran politik kasta Hindia Belanda kala itu. Di tahun 1920, MH Thamrin mendirikan 'Perkumpulan Anak Betawi' untuk memperbaiki nasib warga Betawi, khususnya bagi warga kelas bawah. Sementara itu, sebagai orang pemerintah, MH Thamrin lebih banyak berbicara mengenai hal-hal mikro, seperti masalah banjir atau kampung yang becek. Ia sempat memprotes diabaikannya pembangunan kampung kumuh sedangkan perumahan elit di Menteng justru didahulukan.

Ia juga menyumbangkan tanahnya, dibangun menjadi lapangan sepakbola (cikal bakal Persija) bagi kaum pribumi. Lapangan yang hingga kini diberi nama Stadion VIJ (Voetbalbond Indonesische Jacatra) tersebut dibangun tahun 1928, salah satu wujud kepedulian Thamrin pada warga pribumi atas diskriminasi kolonial Belanda yang melarang pribumi mengakses fasilitas olahraga.

Masih banyak jasa Thamrin lainnya yang dapat dinikmati rakyat hingga kini. Meski ia sudah tiada, jasanya akan terus dikenang. MH Thamrin wafat pada 11 Januari 1941, jasadnya dimakamkan di TPU Karet Bivak.





Mayoritas Kosakata Kita Warisan Penjajah?

Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, kian beragam dengan banyaknya kata serapan. Kata-kata dari bahasa asing maupun bahasa daerah tersebut telah menyatu dan diterima penggunaannya secara umum.

Kedatangan para penjajah di masa lampau sangat memengaruhi keragaman kosakata bahasa kita. *Saking* lamanya penjajah dari Belanda bercokol di negeri ini misalnya, sampai-sampai menyumbang banyak sekali kosakata kita. Sedikit contohnya 'kantor' dari kata 'kantoor', 'buku' dari kata 'boek', dan berbagai kata lain.

Selain bahasa Belanda, bahasa asing lainnya yang memperkaya bahasa Indonesia tentu saja bahasa Arab (dibawa oleh para pedagang dan pendakwah dari jazirah Arab), bahasa Inggris, Portugis, Sansekerta, China dan Jepang.

Nah, berikut ini beberapa contoh kata serapan dari Bahasa Belanda. Coba kita perhatikan, meski ada padanan kata lainnya, serapan dari bahasa Inggris namun kita lebih akrab dan sering menggunakan serapan yang dari bahasa Belanda. Misalnya; karcis (bukan tiket), antre (bukan queue), arloji (bukan watch), buncis (bukan beans). Yuk, kita simak sama-sama!



absen (absent)
 absensi (absentie)
 afdruk (afdruk)
 ajudan (adjutant)
 advokat (advocaat)
 afkir (afkeuren)
 aklamasi (acclamatie)
 andil (aandeel)
 antik (antiek)
 antre (in de rij)
 anyelir (anjelier)
 aparaturn (apparaatuur)
 apatis (apathisch)
 apel (appel)
 apus (aflossen)
 apotek (apotheek)
 arloji (horloge)
 asbak (asbak)
 asuransi (assurantie)
 atase (attache)
 atlet (atleet)
 aubade (aubade)
 aula (aula)
 bak (bak)
 balada (ballade)
 balkon (balkon)
 balok (balk)
 balon (ballon)
 balsem (balsem)
 ban (band)
 banderol (banderol)
 bangkrut (bankroet)
 barak (barak)
 baret (baret)
 baskom (waskom)
 basis (basis)
 batalion (bataljon)

baterai (batterij)	dinas (dienst)	intrik (intrige)
baut (bout)	diploma (diploma)	introspeksi (introspectie)
bayonet (bajonet)	direktur (directuur)	inventaris (inventaris)
bazar (bazaar)	doktoranda (doctoranda)	irigasi (irrigatie)
beha (beha)	doktorandus (doctorandus)	jambore (jamboree)
beken (bekend)	dosen (docent)	jangkar (het anker)
bel (bel)	egois (egoistisch)	jas (jas, overjas)
belasting (belasting)	eksemplar (exemplaar)	jerapah (giraffeh)
bendel (bundel)	erosi (erotie)	jerigen (jerrican)
bengkel (wingkel)	eselon (echelon)	kabel (kabel)
bensin (benzine)	estafet (estafette)	kalkun (kalkoen)
berlian (briljant)	etalase (etalage)	kantin (kantine)
bestek (bestek)	etiket (etiquette)	karcis (kaartjes)
besuk (bezoek)	faktur (factuur)	keran (kraan)
beton (beton)	fiktif (fictief)	lakban (plakband)
bui (boei)	filial (filiaal)	lansir (lanceren)
buket (boeket)	firma (firma)	ledeng (leiding)
bursa (beurs)	flanel (flanel)	loket (loket)
bus (bus)	gang (gang)	loper (loper)
butik (boetiek)	gerendel (grendel)	losmen (logement)
buncis (boontjes)	golok (dolk)	lotere (loterij)
busi (bougie)	gorden (gordijn)	mag (maag)
cokelat (chocolade)	got (goot)	makaroni (macaroni)
dak (dak)	gratis (gratis)	masinis (machinist)
dansa (dansen)	grosir (grossier)	mesin (machine)
dam (dam)	halte (halte)	mesin tik (tjijpmachine)
dasi (das)	ham (ham)	minder (minderwaardig)
debit (debit)	hampir (ampeer)	mosi (motie)
debitur (debiteur)	hanggar (hangaar)	mur (moer)
debut (debuut)	handuk (handdoek)	motto (motto)
dekan (decaan)	honorer (honorair)	naif (naïef)
delegasi (delegatie) d	hotperdom (godverdomme)	necis (netjes)
elik (delict)	hore (hoera)	notulen (notulen)
demarkasi (demarcatie)	ide (idee)	notaris (notaris)
demisioner (demissionair)	idem (idem)	
depot (depot)	indekos (in de kost)	
dikte (dictee)	intonasi (intonatie)	



Kata-kata di atas baru sebagian kecil kosakata bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Belanda. Apalagi ya kira-kira? Apa kalian dapat menemukan dan menambahkannya? ***

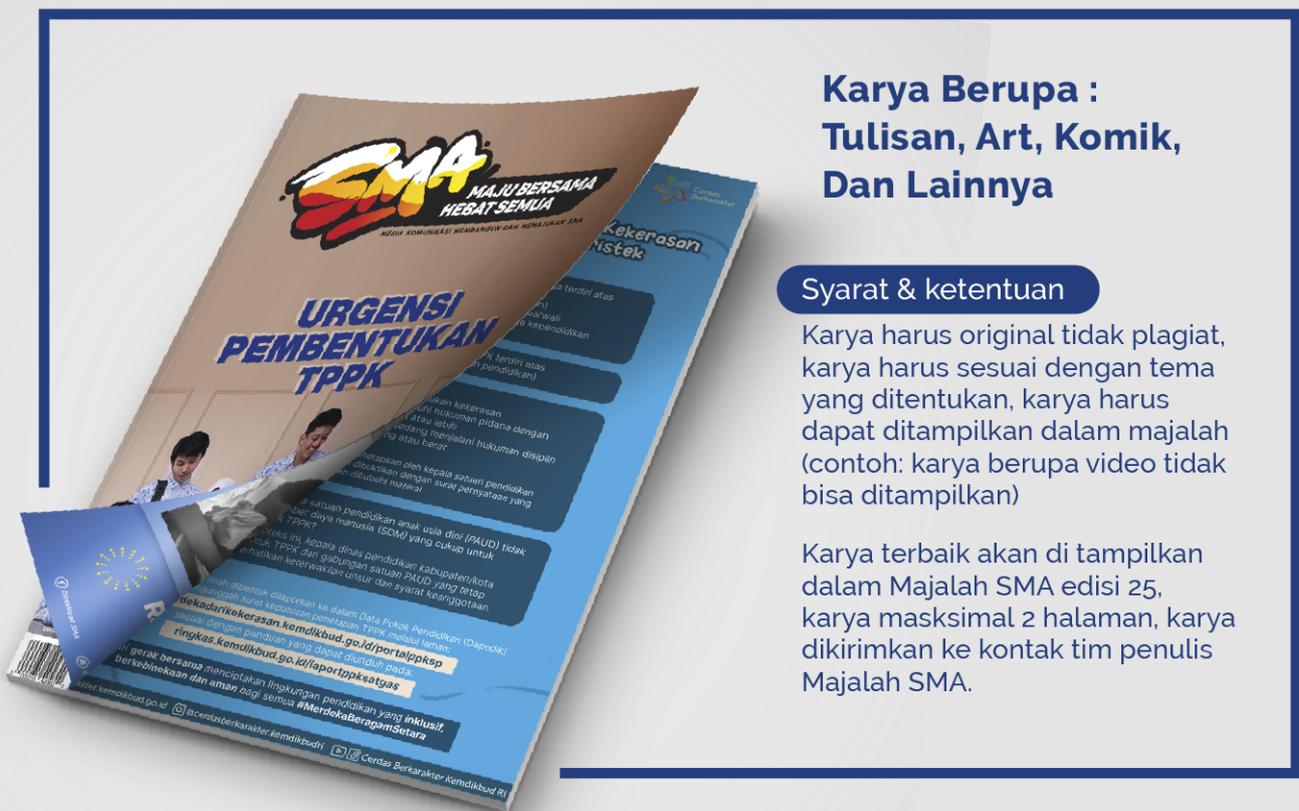


Yuk Berinteraksi



Kirimkan Karyamu

Tema:
Pelajar Pancasila



**Karya Berupa :
Tulisan, Art, Komik,
Dan Lainnya**

Syarat & ketentuan

Karya harus original tidak plagiat, karya harus sesuai dengan tema yang ditentukan, karya harus dapat ditampilkan dalam majalah (contoh: karya berupa video tidak bisa ditampilkan)

Karya terbaik akan di tampilkan dalam Majalah SMA edisi 25, karya maksimal 2 halaman, karya dikirimkan ke kontak tim penulis Majalah SMA.

Direktorat SMA
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan

(021) 7667960
publikasi.psm@kemdikbud.go.id
www.sma.kemdikbud.go.id

SMA Maju Bersama Heat Semua | PEMIKIR • PEJUANG • PEMIMPIN
© 2023 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi